



LAPORAN KINERJA

**Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal**

TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN

2023



#2023
#RKP THRIVE **# bangga**
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahunan 2023 Biro Keuangan dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Tahunan 2023 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja Tahunan 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Biro Keuangan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2023 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pencapaian kinerja Biro Keuangan di Tahunan 2023 telah mencapai 109,05 dengan predikat "Baik". Capaian ini perlu ditingkatkan dan tentunya diperlukan perbaikan pada tahun anggaran selanjutnya sehingga dapat mencapai target serta memberikan kontribusi yang lebih baik dan tercermin melalui nilai capaian kinerja yang baik di tahun yang akan datang.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2023 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Biro Keuangan ke depannya. Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi refleksi untuk peran strategis seluruh jajaran Biro Keuangan semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Jakarta, 16 Januari 2024
Kepala Biro Keuangan



Setyawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.3. Organisasi dan Personalia	2
1.4. Sistematika Penyajian.....	3
1.5. Isu Strategis.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal	5
2.2. Sasaran Kegiatan	5
2.3. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023.....	6
2.4. Program dan Kegiatan	9
2.5. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai <i>feedback</i> Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Analisis Capaian Kinerja	18
3.2.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Nilai RB KKP Yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan	18
3.2.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)	21
3.2.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (opini).....	26
3.2.4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	33
3.2.5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Tingkat Kepatuhan BMN Setjen	39
3.2.6. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Indikator Kinerja Pelaksanaan	

	Anggaran (IKPA) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	42
3.2.7.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setjen	59
3.2.8.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2022 (persen)	64
3.2.9.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (level)	72
3.2.10.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen (persen)	76
3.2.11.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Nilai Pengelolaan PNBSP Sektor Kelautan dan Perikanan	87
3.2.12.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (persen).	117
3.2.13.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Keuangan	119
3.2.14.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Keuangan	126
3.2.15.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan (Nilai)	129
3.2.16.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Biro Keuangan	132
3.2.17.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Unit kerja Biro Keuangan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.....	134
3.2.18.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan	139

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	141
BAB IV PENUTUP	143
4.1. Kesimpulan	143
4.2. Upaya Perbaikan	144
LAMPIRAN	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Kegiatan Biro Keuangan dalam Mekanisme Kerja Baru	x
Tabel 2	Matriks Tim Kerja Biro Keuangan per 1 Agustus 2023	2
Tabel 3	Sasaran Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2023.....	6
Tabel 4	Indikator Kinerja dan Target Biro Keuangan Tahun 2023	7
Tabel 5	Kegiatan dan Pagu Anggaran Biro Keuangan Tahun 2023	9
Tabel 6	Penetapan Target Indikator Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023.....	10
Tabel 7	Uraian Capaian Kinerja pada Tahun 2023	17
Tabel 8	Perbandingan Capaian Nilai RB yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan Tahun 2023	19
Tabel 9	Capaian Hasil Evaluasi RB lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2023	19
Tabel 10	Indeks Pengelolaan Aset KKP	23
Tabel 11	Perbandingan Capaian IKU Indeks Pengelolaan Aset tahun 2023	24
Tabel 12	Capaian IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP (Opini)	28
Tabel 13	Perkembangan Capaian Opini atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018-2022.....	28
Tabel 14	Perbandingan Capaian Opini atas LK KKP dengan KL lainnya Tahun 2018-2022.....	29
Tabel 15	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen	34
Tabel 16	Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan tahun 2023.....	35
Tabel 17	Perhitungan indikator ketersediaan pada sebuah entitas pelaporan.....	35
Tabel 18	Perhitungan indikator ketepatan waktu dan kesesuaian untuk sebuah entitas pelaporan	36
Tabel 19	Penghitungan Capaian Kementerian	36
Tabel 20	Perhitungan Capaian Penyerapan Anggaran.....	37
Tabel 21	Data Realisasi dari aplikasi OM SPAN tanggal 2 Januari 2024	38
Tabel 22	Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN Setjen 2023	39
Tabel 23	Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Organisasi Eselon I 2023.....	41
Tabel 24	Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024	44
Tabel 25	Perbandingan Capaian IKPA Tahun 2023	44
Tabel 26	Rincian Capaian IKPA KKP Tahun 2023 Per Unit Eselon I	47

Tabel 27	Nilai IKPA K/L Seluruh Indonesia.....	49
Tabel 25	Bobot Per Indikator Atas Aspek Penilaian Kinerja Anggaran Per Level.	60
Tabel 29	Perbandingan Capaian NKA tahun 2023	62
Tabel 27	Dokumentasi Rapat Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	67
Tabel 31	Perbandingan Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN”	68
Tabel 32	Level Maturitas SPIP KKP (Level)	73
Tabel 33	Perbandingan Nilai Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan SDA BPKP.....	74
Tabel 34	Formula Perhitungan IKU.....	76
Tabel 35	Daftar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang menjadi target penilaian capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2023	77
Tabel 36	Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2017 - 2023	79
Tabel 37	Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023	80
Tabel 38	Capaian kinerja TA 2023	89
Tabel 36	Target dan Pagu PNBP per unit Eselon I (dalam rupiah).....	91
Tabel 37	Target dan Pagu PNBP per Akun Penerimaan (dalam rupiah).....	92
Tabel 41	Target dan Pagu PNBP per unit Eselon I hasil Banggar DPR RI.....	97
Tabel 42	Matriks Aturan Pelaksanaan PNBP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan.....	98
Tabel 43	Matriks Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan PNBP KKP dan Perubahannya.....	99
Tabel 44	Perkembangan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KKP	102
Tabel 45	Monitoring realisasi atas target PNBP yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2023 (dalam Rp)	104

Tabel 46	Monitoring penggunaan dana PNBP Tahun 2023.....	108
Tabel 47	Monitoring pengelolaan piutang PNBP Tahun 2023	108
Tabel 48	Informasi Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP	110
Tabel 49	Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP	112
Tabel 50	Perkembangan usulan izin penggunaan Sebagian dana PNBP SDA Perikanan Lintas Unit Eselon I	113
Tabel 51	Perbandingan Capaian Nilai Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan.....	115
Tabel 52	Capaian IKU Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengelolaan Keuangan dan BMN (Persen).....	118
Tabel 53	Penyesuaian Bobot Kualifikasi.....	120
Tabel 54	Penyesuaian Bobot Kompetensi	121
Tabel 55	Penyesuaian Bobot Kompetensi	121
Tabel 56	Penyesuaian Bobot Kinerja	121
Tabel 57	Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Keuangan	125
Tabel 58	Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2022” Tahun 2023.....	126
Tabel 59	Capaian IKU Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan Tahun 2023	128
Tabel 60	Nilai PM SAKIP Setjen	129
Tabel 61	Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan (Nilai).....	130
Tabel 62	Target dan Realisasi IKU Unit Kerja Biro Keuangan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar.....	135
Tabel 63	Capaian IKU Unit Kerja Biro Keuangan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar	136
Tabel 64	Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Setjen KKP Tahun 2023.....	137
Tabel 65	Capaian Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan Tahun 2023.....	139
Tabel 66	Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	3
Gambar 2	Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023	16
Gambar 3	Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	43
Gambar 4	Capaian IKPA Triwulanan Unit Eselon I KKP Tahun 2023	48
Gambar 5	Proporsi Penilaian Kinerja Anggaran Per Level	59
Gambar 6	Kategori Penilaian NKA	60
Gambar 7	Realisasi NKA Sekretariat Jenderal	61
Gambar 8	Progres Perbandingan Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN”	69
Gambar 9	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada KKP	74
Gambar 10	Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Area of Improvement (AoI)	75
Gambar 11	Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal	82
Gambar 12	Dokumentasi Rapat Pembahasan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Unit Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal	83
Gambar 13	Progres Perbandingan Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja”	84
Gambar 14	Capaian IKU IP ASN lingkup Biro Keuangan	124

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023 berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi selama tahun 2023 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Adapun IKU Biro Keuangan di Tahun 2023 dan pembagian Tim Kerja Biro Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembagian IKU Biro Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan dalam Mekanisme Kerja Baru

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	TIM KERJA
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga	1	Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan (nilai)	3,45	Akuntansi Pelaporan Keuangan
		2	Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)	3,35	Pengelolaan BMN
		3	Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP (5)	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
		4	Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	0,65	Akuntansi Pelaporan Keuangan
		5	Tingkat Kepatuhan BMN Setjen (persen)	80	Pengelolaan BMN
		6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP (nilai)	93,75	Perbendaharaan
		7	Nilai Kinerja Anggaran Setjen (nilai)	86	Pelaksanaan Anggaran
		8	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2022 (persen)	≤0,5	Tindak Lanjut
		9	Tingkat Maturitas SPIP KKP (level)	3	Kepatuhan Internal
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen (persen)	75	Tindak Lanjut

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	TIM KERJA
		11	Nilai pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	100	Pelaksanaan Anggaran
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan	12	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (persen)	100	Dukungan Manajemen
		13	Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan (Indeks)	79	
		14	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan (persen)	100	
		15	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan (nilai)	80,5	
		16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan (persen)	75	
		17	Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro Keuangan (persen)	92	
		18	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan (persen)	95	

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembagian IKU Biro Keuangan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan capaian kerja tersebut Biro Keuangan di Tahun 2023, Biro Keuangan memperoleh nilai kerja organisasi sebesar 120 dengan predikat istimewa. Hal ini menunjukkan Biro Keuangan terus berupaya dalam memaksimalkan capaian kinerja di tengah perubahan tim kerja. Oleh karena itu, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya karena keberhasilan dalam pencapaian sasaran kerja Biro Keuangan didukung oleh faktor internal dan eksternal yang kuat. Adapun rangkuman keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Keuangan diuraikan secara lebih rinci dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan Tahunan 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahunan 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Keuangan atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahunan 2023 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas kinerja yang telah diperjanjikan kepada Sekretaris Jenderal dan memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkaitan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pada awal tahun 2020, tepatnya 25 September 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal, secara organisasi Biro Keuangan berada di bawah Sekretariat Jenderal.

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan, serta pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja;
2. koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;

3. koordinasi dan pengelolaan badan layanan umum;
4. koordinasi dan pelaksanaan tata laksana dan transformasi keuangan serta kepatuhan pejabat perbendaharaan;
5. koordinasi dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, serta penyelesaian kerugian negara;
6. koordinasi dan pengelolaan barang milik negara; dan
7. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

1.3. Organisasi dan Personalia

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Keuangan menerbitkan Surat Tugas dengan Nomor B.1990/SJ.2/KP.440/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. ST perubahan ini dilatarbelakangi adanya Ketua Tim Kerja yang telah memasuki Batas Usia Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023. Oleh karena itu dilakukan perubahan susunan Ketua dan Anggota pada Surat Tugas Tim Kerja yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2023 sehingga adanya perubahan jumlah pegawai. Adapun jumlah tim kerja di Biro Keuangan tetap terdiri dari 7 tim yang memiliki tugas utama dan pendukung dengan uraian berikut:

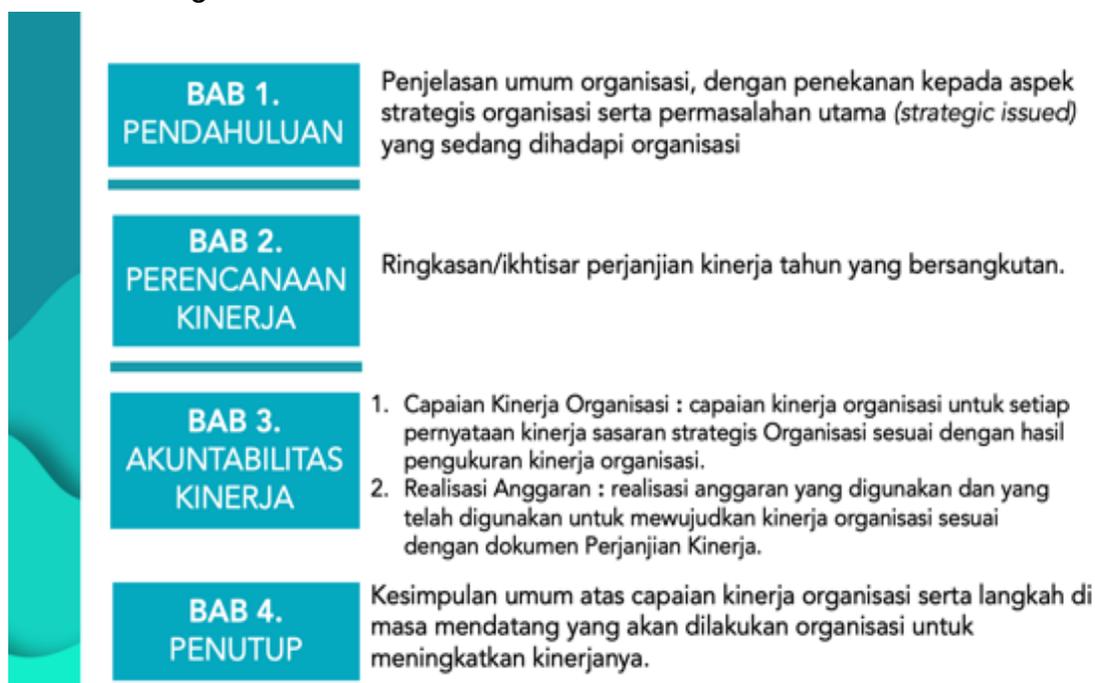
Tabel 2 Matriks Tim Kerja Biro Keuangan per 1 Agustus 2023

TIM KERJA BIRO KEUANGAN						
PB	KI	PA	P. BMN	APK	TL	DUKMAN
<ul style="list-style-type: none"> •Ketua Tim: Muhono •Anggota: •UTAMA 1. Arifin Syam 2. Revo Triano A.S 3. Agus Prasetyo 4. Budiani Ayu D. 5. Agustinus 6. Bagus Aji D. 7. Dirtan Janssem M. 8. Paulus Tupado •PENDUKUNG 9. Martha Lusya P. 10. Wuri Samiyoto 11. Irmala Shitta 12. M. Ali Akbar 13. Naufal Rifqi Y •PJ. HUMAS 1. Dirtan Janssem M. 2. Bagus A Darmawan •PELAKSANA PJ KEGIATAN •Naufal Rizqi Yusnandar •Mitra UE I Ditjen PRL 	<ul style="list-style-type: none"> •Ketua Tim: Aris Suyono •Anggota: •UTAMA 1. Wisnu Danang 2. Kuni Affah 3. Nyimas Halida S.C 4. Hamzah Nur Iqbal •PENDUKUNG 5. Revo Triano AS 6. Nugroho Budiharto 7. Adityo L.N 8. Donna Arwinda 9. Wiji Hardianti 10. Alia Rahmadani 11. Paulus Tupado 12. Sabrian Bassel •PJ. Humas •Hamzah Nur Iqbal •Pelaksana PJ. Kegiatan •Hamzah Nur Iqbal •Mitra UE I Ditjen PDS dan BRSDMKP 	<ul style="list-style-type: none"> •Ketua Tim: Nugroho Budiharto •Anggota: •UTAMA 1. Aries Sariyanto 2. Brigitta Dhenny P. 3. Harianto Eka Putra 4. Irmala Shitta 5. Ika Desmiarti 6. Amilia •PENDUKUNG 7. Dian Hesty Andayani 8. Wisnu Danang 9. Sundari Ika B. 10. Nyimas Halida S. C 11. Bagus Aji D. 12. I. Putu Surya S.P 13. Dading Surya Al. M 14. Satriani •PJ. Humas 1. Aries Sariyanto 2. Amilia •Pelaksana PJ. Kegiatan •Dading Surya Al. M •Mitra UE I Itjen dan Ditjen PSDKP 	<ul style="list-style-type: none"> •Ketua Tim: Moch. Bayu D. •Anggota: •UTAMA 1. Tut Wuri Handayani 2. Sundari Ika B. 3. Donna Arwinda 4. Rovvy Mariani M. 5. Wuri Samiyoto 6. Giana Dear 7. Zasarah Zahwa T. 8. I. Putu Surya S.P 9. M. Ali Akbar 10. M. Oka M. •PENDUKUNG 11. Sutrisno Subagyo 12. Arifin Syam 13. Dian Hesty Andayani 14. Agus Prasetyo 15. Harianto Eka Putra 16. Dicky Asoksan Pramana 17. Wahyu Widya N. 18. Faaza Naima 19. Shafira Zahdanti •PJ. Humas •M. Ali Akbar •Pelaksana PJ. Kegiatan •Zasarah Zahwa T. •Mitra UE I Ditjen P. Budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> •Ketua Tim: Sutrisno •Anggota •UTAMA 1. Dian Hesty Andayani 2. Silvy Ratna Esther P. 3. Dicky Asoksan Rachmana 4. Adityo L. N 5. Alia Rahmadani •PENDUKUNG 6. Muhono 7. Aris Suyono 8. Herlan Suherlan 9. Arifin Syam 10. Aries Sariyanto 11. Revo Triano A.S. 12. Martha Lusya P. 13. Agus Prasetyo 14. Wisnu Danang 15. Rahmah Nurhalla 16. Meirida Utama 17. Kuni Alfah 18. Agustinus Ari S.W 19. Rifani Aswab 20. Irwan 21. Gondo Kusumo 22. Brigitta Dhenny Putrianti 23. M. Bayu D. 24. Tut Wuri H. 25. Budiani Ayu D 26. Wahyu Setiawati 27. Amilia 28. Zasarah Tarigan 29. Hamzah Nur Iqbal 30. Dirtan Janssem Manaku 31. Muhammad Hadi 32. Ranti Hasmiyani 33. Aulia Haeirda Putra •PJ HUMAS •Adityo L. Nugroho •PPJ. Kegiatan •Muhammad Hadi •Mitra UE I Ditjen Tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> •Ketua Tim: Herlan Suherlan •Anggota •UTAMA 1. Martha Lusya P. 2. Rahmah Burhilal 3. Faaza Naima 4. Elifan •PENDUKUNG 5. Aries Sariyanto 6. Brigitta Dhenny P. 7. Rovvy M.M 8. Harianto Eka P. 9. Budiani Ayu D. 10. Silvy Ratna Esther. 11. Ika Desmiarti 12. Kusnadi •PJ HUMAS •Faaza Naima •Pelaksana PJ. Kegiatan •Faaza Naima •Mitra UE I BKIPMKHP 	<ul style="list-style-type: none"> •Ketua Tim: Meirida Utama. •Anggota: •UTAMA 1. Rifani Aswab 2. Irwan 3. Gondo Kusumo 4. Wiji Mutia 5. Satriani Situmorang 6. Kusnadi 7. Wahyu Widya N. 8. Shafira Zahdanti 9. Brythania Ananta. M.P 10. Dading Surya Al Majid 11. Rifqi Yusnandar 12. Muhammad Hadi 13. Ranti Hasmiyani 14. Hari Aulia Haeirda P. 15. Sabrian Bassel 16. Sholihan 17. Indriyani •PENDUKUNG 18. Muhammad Oka M 19. Elifan •PJ HUMAS 1. Satriani Situmorang 2. Muhammad Hadi •Pelaksana PJ. Kegiatan •Safira

Pada Tahun 2023, Biro Keuangan memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 54 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), 2 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah keseluruhan pegawai lingkup Biro Keuangan tersebut dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin 34 orang laki-laki dan 25 orang perempuan.

1.4. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagaimana Gambar 2 berikut:



Gambar 1 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014

1.5. Isu Strategis

Biro Keuangan dalam melakukan tugas dan fungsinya dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain adalah mencapai Opini BPK atas LK KKP (opini) dengan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perubahan target pada Indikator Kinerja Biro Keuangan sebagai pembentuk reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan adanya perubahan organisasi terkait dengan pembentukan tim kerja yang disesuaikan dengan peraturan dan mitra kerja. Oleh karena itu Biro Keuangan harus menjalankan tugas dan fungsinya lebih baik kedepannya, mengingat Biro Keuangan memiliki target indikator kinerja yang terus meningkat dan juga perlu pengembangan dalam menghadapi tantangan baru dari tahun ke tahun.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Permen KP No.17/2020) tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Visi pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, pada tahun 2020-2024 Sekretaris Jenderal menetapkan visi sebagai berikut:

Misi yang diemban oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan visi

“Penggerak Utama Tata kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen
2. Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP

2.2. Sasaran Kegiatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran Kegiatan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Biro Keuangan sebagai *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam mencapai tujuan Biro Keuangan 2020-2024, sasaran Kegiatan Biro Keuangan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	
1.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga
2.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan

Selanjutnya dari sasaran strategi tersebut disusunlah peta strategi. Peta strategi adalah sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan melalui metode *Balanced Scorecard* (BSC) untuk mengelola kinerja organisasi.

2.3. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang tanggung jawab/ kinerja. Pada tahun 2023 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 12.767.230.000, Biro Keuangan telah memperjanjikan 2 Sasaran Kegiatan dan 18 target IKU dengan Sekretaris Jenderal yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4 Indikator Kinerja dan Target Biro Keuangan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET PENGESAHAN 9 JANUARI 2023	TARGET PENGESAHAN 13 DESEMBER 2023
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga	1	Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan (nilai)	3,45	3,45
		2	Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)	2,74	3,35
		3	Opini BPK atas LK KKP (opini)	-	WTP (5)
		4	Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	0,65	0,65
		5	Tingkat Kepatuhan BMN Setjen (persen)	80	80
		6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP (nilai)	89	93,75
		7	Nilai Kinerja Anggaran Setjen (nilai)	86	86
		8	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2022 (persen)	≤0,5	≤0,5
		9	Tingkat Maturitas SPIP KKP (level)	3	3
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen (persen)	75	75
		11	Nilai pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	100	100
2	Terwujudnya layanan	12	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang –	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET PENGESAHAN 9 JANUARI 2023	TARGET PENGESAHAN 13 DESEMBER 2023
dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan			undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (persen)		
	13		Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan (Indeks)	79	79
	14		Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan (persen)	100	100
	15		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan (nilai)	-	80,5
	16		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan (persen)	75	75
	17		Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro Keuangan (persen)	92	92
	18		Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan (persen)	95	95

2.4. Program dan Kegiatan

Biro Keuangan melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 Kegiatan dan Pagu Anggaran Biro Keuangan Tahun 2023

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	7,276,010,000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	5,491,220,000
Total Anggaran Biro Keuangan Tahun 2023		12.767.230.000

2.5. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai *feedback* Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Penentuan target Indikator Kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Biro Keuangan tahun 2022 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Penetapan Target Indikator Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2022	Capaian 2022	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2023	Keterangan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga						107,15	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga		
Nilai RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,41	3,53	103,52	Nilai RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan	3,45	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2022
							Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)	3,35	Indikator Kinerja merupakan IK Baru di tahun 2023 yang diturunkan dari IKU Kementerian Keuangan
							Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP (5)	Merupakan Indikator Kinerja baru di Triwulan IV Tahun 2023
							Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	0,65	Indikator Kinerja merupakan IK Baru di tahun 2023 yang diturunkan dari IKU Kementerian Keuangan
Tingkat Kepatuhan	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	100	120	Tingkat Kepatuhan	80	Target disusun berdasarkan

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2022	Capaian 2022	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2023	Keterangan
BMN Setjen (persen)							BMN Setjen (persen)		Capaian Kinerja tahun 2022
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setjen (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	89	93,38	104,92	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP (nilai)	93,75	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2022
Nilai Kinerja Anggaran Setjen (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	87,73	102,01	Nilai Kinerja Anggaran Setjen (nilai)	86	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2022
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2021 (persen)	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	≤1	0	120	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2022 (persen)	≤0,5	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2022
Level Maturitas SPIP KKP (level)	Level	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3	3	100	Tingkat Maturitas SPIP KKP (level)	3	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2022
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen (persen)	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	70	97,86	120	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen	75	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2022

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2022	Capaian 2022	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2023	Keterangan
							(persen)		
Nilai pengelolaan PNBPNBP Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	Nilai pengelolaan PNBPNBP Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	100	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2022
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan						107,50	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan		
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (persen)	100	Sasaran Kinerja IK ini dipindah ke SK kedua yaitu Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan di tahun Anggaran 2023
Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	78	79,95	102,50	Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan (Indeks)	79	
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan (persen)	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan (persen)	100	
Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro Keuangan (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	97,50	105,98			Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Keuangan diubah menjadi Nilai Penilaian Mandiri

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2022	Capaian 2022	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2023	Keterangan
									SAKIP Biro Keuangan pada Tahun Anggaran 2023
							Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan (nilai)	80,5	Indikator Kinerja perubahan dari Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Keuangan. Perubahan ini dapat tercapai dengan mengacu pada Penilaian Mandiri SAKIP oleh Biro Perencanaan di Tahun 2023.
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan (persen)	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	70	100	120	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan (persen)	75	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2022
Unit kerja Biro Keuangan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Persen	Maximize	Rata-rata	88	100	113,64	Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro Keuangan (persen)	92	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2022

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2022	Capaian 2022	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2023	Keterangan
Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan (persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	97,75	102,89	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan (persen)	95	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

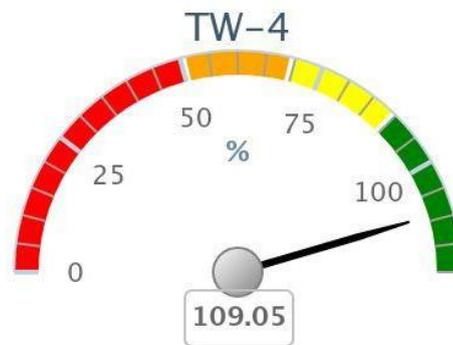
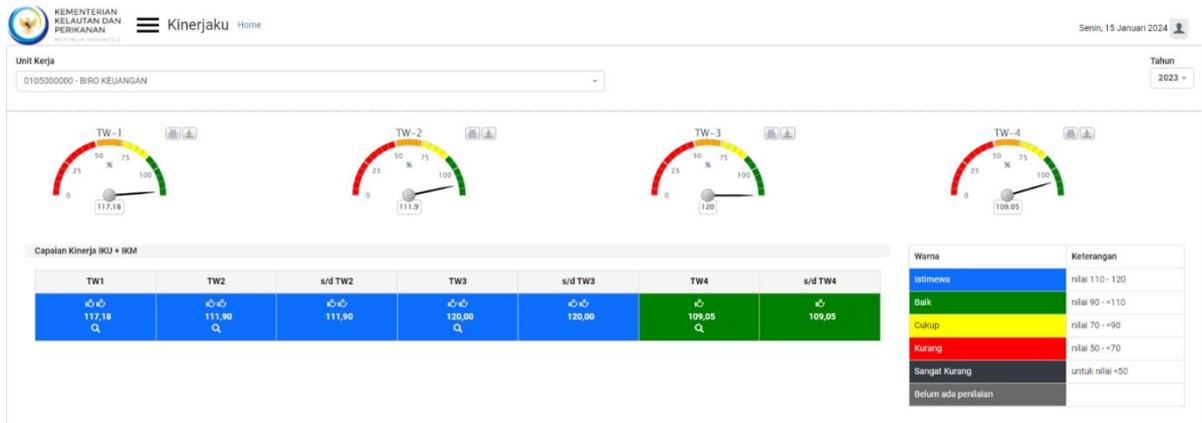
3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yakni setiap bulan. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan/ semester/ tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja Biro Keuangan dilakukan secara triwulanan.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Jenderal menggunakan aplikasi *database online* www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Bagian dan Subbagian di lingkungan Biro Keuangan. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja tersebut di atas, serta seluruh perjanjian kinerja di level 2, 3 dan 4 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran dan pelaporan kinerja Biro Keuangan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK), dengan tampilan *dashboard* capaian Biro Keuangan Tahun 2023 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2 Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023

Sumber: kinerjaku.kkp.go.id per 15 Januari 2024

Secara rinci capaian kinerja Biro Keuangan Tahun 2023 berdasarkan uraian capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Uraian Capaian Kinerja pada Tahun 2023

No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (Triwulan)				Capaian (Triwulan)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN								
1.1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga								
1.1.1	Nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan (nilai)	-	-	-	3,45				3,66
1.1.2	Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)	-	-	-	3,35				3,48
1.1.3	Opini BPK atas LK KKP (opini)				WTP (5)				WTP (5)
1.1.4	Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	-	0,4	-	0,65		0,60		0,81
1.1.5	Tingkat Kepatuhan BMN Setjen (persen)	-	-	-	80				90
1.1.6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP (nilai)	-	82	-	93,75		85,99		91,99
1.1.7	Nilai Kinerja Anggaran Setjen (nilai)	-	-	-	86				90,84
1.1.8	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2021 (persen)	-	-	-	<0.5				0,01
1.1.9	Level Maturitas SPIP KKP (level)	-	-	-	3				3
1.1.10	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen (persen)	75	75	75	75	100	100	100	99,12
1.1.11	Nilai pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	-	-	-	100				100
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum								
2.1	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan								
2.1.1	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (persen)	-	-	-	100				100
2.1.2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Keuangan (Indeks)	-	72	-	79		73.03		89,49
2.1.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Keuangan (persen)	-	-	-	100				100
2.1.4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan (nilai)	-	-	-	80,5				85,50
2.1.5	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Keuangan (persen)	75	75	75	75	100	100	100	100
2.1.6	Unit kerja Biro Keuangan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	92	92	92	100	100	133.3	133,33
2.1.7	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan (persen)	-	-	-	95				99,36

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan:

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga

Nilai capaian sasaran kegiatan ini didukung oleh **11 (sebelas)** Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

3.2.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Nilai RB KKP Yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau *business process*; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan rapat yang telah dilakukan pada rancangan RB maka matriksnya adalah pada Matriks Indikator Pembentuk Reformasi Birokrasi General (dapat dilihat pada tabel). Biro Keuangan menjadi koordinator atau penanggung jawab terhadap beberapa indikator yaitu tingkat maturitas SPIP, Opini BPK, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dan Indeks Pengelolaan Aset. Adapun IKU Nilai RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawa Biro Keuangan masih dalam proses koordinasi sehingga indikator yang melekat pada Biro Keuangan disampaikan pada Indikator Kinerja secara terperinci. Adapun capaian Nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Perbandingan Capaian Nilai RB yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan Tahun 2023

SK1							: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga				
IK 1							: Nilai RB yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan Tahun 2023				
Realisasi 2017-2022							Realisasi 2023		Renstra Tahun 2020-2024		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra	
-	9,6	11,34	4,33	3,60	3,41	3,45	3,66	106,08	-	97,6	

(IK dihitung Tahunan)

Capaian IKU Nilai RB mencapai 3,66 dari target 3,45. Capaian ini melebihi target tahun 2023. Capaian terhadap Renstra 2024 untuk IK Nilai RB mencapai 97,6 namun pada tahun 2024 IK ini sudah tidak menjadi tanggung jawab Biro Keuangan melainkan dikembalikan ke IK Biro SDMAO. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, nilai hasil evaluasi dengan indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 adalah 78,43 dengan kategori dan adapun capaian hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2023 lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian Hasil Evaluasi RB lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2023

No.	Nama Unit Organisasi	Target	Capaian TW IV 2023
1.	Biro Perencanaan	13,32%	14,31%
2.	Biro Keuangan	3,45%	3,66%
3.	Biro SDMAO	19,18%	20,33%
4.	Biro Hukum	4,32%	4,45%
5.	Biro Humas dan KLN	3,70%	3,92%
6.	Biro Umum dan PBJ	1,23%	1,31%
7.	Pusdatin	13,88%	14,71%

Capaian untuk RB sudah menjadi IK Biro SDMAO

Adapun tantangan yang dihadapi dalam mencapai nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan adalah:

1. Area pada RB Biro Keuangan yang berubah dari tahun ke tahun
2. Target pembentuk nilai RB yang cukup tinggi

Biro Keuangan berusaha mencapai target IK Nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan adalah dengan melakukan koordinasi dengan melalui monitoring dan evaluasi terkait dengan IK pembentuk baik dengan mitra kerja di internal KKP maupun mitra kerja eksternal (Kemenkeu dan BPKP).

3.2.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)

Indeks Pengelolaan Aset adalah suatu ukuran yang menggambarkan kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) parameter. Perhitungan terhadap Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dilakukan pada akhir tahun, dengan *weighted average* (rata-rata tertimbang) dari parameter-parameter tersebut. Namun, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, belum diperoleh nilai resmi dari Kementerian Keuangan selaku Instansi Pembina. Oleh karena itu, Biro Keuangan melaksanakan perhitungan mandiri dengan mengacu pada PMK Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara, maka diperoleh Skor 3,48. Rincian perhitungan IPA KKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif

Merupakan kegiatan pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan perundangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung APBN, terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut :

a. Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN

Skor Capaian 0,6 yang dihitung dengan membandingkan jumlah keseluruhan target temuan BPK terkait BMN yang ditindaklanjuti dengan jumlah keseluruhan saldo temuan BPK terkait BMN (rincian terlampir).

b. Realisasi PNBPN dari Pengelolaan Aset

Skor Capaian 0,25 yang diperoleh dari nilai sub parameter yaitu Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN dan sub parameter Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang (rincian terlampir).

2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundangan

Mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait Pengelolaan BMN. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan

BMN pada unit pengguna barang (K/L) yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari 2 (dua) parameter pengukuran sebagai berikut

- a. Ketepatan Waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN

Skor Capaian 0,37 yang diperoleh dari 3 Sub Parameter yaitu Ketepatan Waktu Penyampaian RKBMN, Ketepatan Waktu Penyampaian LBP, dan "Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal.

- b. Asuransi BMN

Skor Capaian: **0,4** .

3. Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif Mengukur dua parameter sebagai berikut:

- a. Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN

Skor Capaian 0,6 (Rincian Terlampir)

- b. Tindak Lanjut Terhadap BMN yang Rusak Berat

Skor Capaian 0,1 (Rincian terlampir)

4. Administrasi BMN yang Andal

Mengukur dua parameter sebagai berikut:

- a. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan

Skor Capaian 0,56 dihitung dari Sub Parameter Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan Sub Parameter Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN (rincian terlampir).

- b. Penggunaan BMN yang Sesuai Ketentuan

Skor Capaian 0,6 dihitung dari Sub Parameter Kesesuaian Penggunaan BMN sesuai SBSK dan Sub Parameter BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan (rincian terlampir).

Tabel 10 Indeks Pengelolaan Aset KKP

No	Parameter	Data		Nilai Parameter	yesuaian Kelom	Bobot	Nilai Parameter Akhir Setelah Penyesuaian	Indeks	Sumberdata
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9,00	10
1	Pengelolaan BMN Yang Akuntabel dan Produktif								
1,1	Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	Ditindaklanjuti	Jumlah Temuan s.d. T-1			Bobot		0,60	TL LHP BPK
		4	4			15%			
1,2	Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN					Bobot		0,25	
						10%			
1.2.1	Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN	PNBP dari Pengelolaan BMN	Estimasi/ Target Pendapatan			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,00	1. Laporan Realisasi Anggaran dari aplikasi Sakti dan Om SPAN
		23.778.699.883	6.860.036.157	347%	-	50%	4,00		
1.2.2	Realisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	Pendapatan Berdasarkan Persetujuan	Total Nilai Pendapatan Pemanfaatan (MAK 42513)			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,50	1. Laporan Realisasi Anggaran dari aplikasi Sakti dan Om SPAN 2. Data SIMAN BMN
		470.178.100	8.763.834.091	5%	-	50%	1,00		
2	Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Perundang-Undangan								
2,1	Ketepatan Waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN					Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,37	1. Surat Penyampaian Jadwal Tenggat Waktu Penyampaian Usulan RKBMN kepada K/L dari DJKN 2. Tanggal agenda surat penyampaian RKBMN di Pengelola Barang
						10%			
2.1.1	Ketepatan Waktu Penyampaian RKBMN	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	1,20	1. Surat Penyampaian Jadwal Tenggat Waktu Penyampaian Usulan RKBMN kepada K/L dari DJKN 2. Tanggal agenda surat penyampaian RKBMN di Pengelola Barang
		26 Oktober 2023	10 November 2023	4	-	30%	4,00		
2.1.2	Ketepatan Waktu Penyampaian LBP	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,90	1. Surat Penyampaian Jadwal Tenggat Waktu Penyampaian ULBP Semester 2 tahun 2022 dan LBP semester 1 tahun 2023 dari K/L ke DJKN 2. Tanggal agenda surat pmasuk di Pengelola Barang atas penyampaian LBP semester 2 tahun 2022 dan LBP semester 1 tahun 2023
		24 Februari 2023	27 Februari 2023	3	-	30%	3,00		
		19 Mei 2023	21 Mei 2023	3	-				
2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	1,60	1. Surat Penyampaian Jadwal Tenggat Waktu Penyampaian wasdal Semester1 tahun 2032 2. Tanggal agenda surat pmasuk di Pengelola Barang atas penyampaian wasdal semester 1 tahun 2023
		14 Juli 2023	19 Juli 2023	4%	-	40%	4,00		
2.2	Asuransi BMN	Kegiatan		Indeks		Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,40	Polis Asuransi
		Penyerahan Polis Asuransi BMN		-		10%	4,00		
3	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
3.1	Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	Persetujuan Ditindaklanjuti	Jumlah Persetujuan			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,60	
		34	34	100%		15%	4,00		
3.2	Tindak Lanjut Terhadap BMN yang Rusak Berat	Mutasi Tambah BMN RB T-0	Mutasi Kurang BMN RB T-0			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,10	
		6.113	5.001	Mutasi Tambah < Mutasi Kurang		10%	1,00		
4	Administrasi BMN yang Andal								
4,1	Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan					Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,56	
						15%			
4.1.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat(m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	3,00	

		21.886.403	24.983.124	88%	110%	75%	4,00	
4.1.2	Penuntasan target sertifikasi BMN	Target sertifikasi yang diselesaikan	Target sertifikasi t-0			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	
		4	6	66,00%	110%	25%	3,00	0,75
4,2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan					Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,60
					15%			
4.2.1	Kesesuain Penggunaan BMN sesuai SBSK	Total Luas SBSK (m2)	Total Luas eksisting (m2)			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,80
		9.961.759	2.483.965		110%	70%	4,00	Kertas Kerja Perhitungan SBSK
4.2.2	BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan	BMN Tanah dan/atau bangunan PSP	Total BMN T/B t-0			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	1,20
		6.190	7.916	78%	110%	30%	4,00	Modul Master Aset Aplikasi BMN
3,48								

Adapun capaian IK Indeks Pengelolaan Aset di tahun 2023 yang merupakan IK baru Biro Keuangan tahun 2023 dan tidak ada target pada Renstra 2024. Capaian IK IPK tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 11 Perbandingan Capaian IKU Indeks Pengelolaan Aset tahun 2023

SK1	: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga						
IK 2	: Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)						
Capaian Tahun 2020 - 2023				Realisasi 2023		Renstra Tahun 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra
-	-	-	3,35	3,48	127	3,35	-

Pencapaian Indeks Pengelolaan Aset sejumlah 3,48 merupakan pencapaian yang baik, terlepas dengan peningkatan target dari 2,74 menjadi 3,35. Berdasarkan tabel perhitungan indeks di atas, terdapat 3 parameter yang mendapatkan nilai penuh yaitu Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN, Asuransi BMN, dan Penggunaan BMN sesuai Kebutuhan. Capaian ini menjadi bukti sinergi yang terjalin antara Biro Keuangan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam Pengelolaan BMN di lingkungan KKP khususnya seluruh tim Pengelolaan BMN Unit Organisasi Eselon I. Untuk Asuransi BMN, tahun 2023 menjadi tahun kedua KKP bekerja sama dengan PT Jasa Asuransi Indonesia menerbitkan Polis Asuransi atas BMN KKP yang dinilai merupakan aset strategis rawan bencana alam dan/atau bahaya lain sebagai upaya pengamanan aset dan bentuk mitigasi risiko dalam pengelolaan BMN.

Untuk parameter yang belum tercapai secara optimal seperti Realisasi

PNBP dari Pengelolaan BMN, sub parameter realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang terjadi akibat kurang maksimalnya monitoring atas realisasi PNBP yang berasal dari pemanfaatan BMN dibandingkan dengan persetujuan yang terbit dari Pengelola Barang (KPKNL, Kemenkeu) baik tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Biro Keuangan akan mengupayakan *database* bersama dengan Unit Organisasi Eselon I untuk monitoring PNBP pemanfaatan BMN, serta mendorong PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN yang belum berasal dari persetujuan Pengelola Barang.

Parameter lain yang belum tercapai optimal adalah ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN, sub parameter Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) mendapatkan nilai 3,0 dari 4,0, untuk sub parameter penyampaian RKBMN dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) mendapatkan nilai penuh. Nilai 3,0 atas ketepatan waktu penyampaian BMN terjadi karena LBP disampaikan pada rentang H-3 dan H-0 batas waktu penyampaian LBP yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut dapat didorong dengan penyusunan LBP yang lebih sistematis dan sungguh-sungguh memperhatikan batas waktu penyampaian yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

Untuk parameter yang mendapatkan nilai 1,0 dari 4,0 yaitu tindak lanjut terhadap BMN yang rusak berat membutuhkan perhatian lebih dari Biro Keuangan dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMN di lingkungan KKP. Hal itu terjadi karena belum adanya komitmen bersama untuk segera mendorong penghapusan aset-aset yang sudah melewati masa manfaat atau rusak berat. Penyebab yang lain yang dimungkinkan adalah langkah panjang yang harus ditempuh untuk menghapuskan pencatatan BMN, bahkan bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 periode akuntansi mulai dari usulan satuan kerja sampai terbit Surat Keputusan Penghapusan BMN.

3.2.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (opini)

Atas Laporan Keuangan Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- **Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan;
- **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP).** Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakselarasan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal;

- **Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;
- **Opini tidak wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan;
- **Opini tidak menyatakan pendapat (TMP)** oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Capaian opini atas laporan keuangan KKP dihitung berdasarkan opini BPK atas Laporan Keuangan KKP pada periode tahun sebelumnya, sehingga untuk realisasi tahun 2023 merupakan opini BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 yang memperoleh opini WTP dengan capaian pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Capaian IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP (Opini)

SK 1		Tata Kelola Pemerintah Yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja sama Antar Lembaga							
IK 3		Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP (Opini)							
Realisasi 2019-2023					2023			Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
				5	5	5	100	5	100

Perkembangan opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan KL BUN Tahun 2015-2021, dimana pada Tahun 2021, entitas pemeriksaan mencakup 87 KL dan satu BUN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13 Perkembangan Capaian Opini atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018-2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	82	85	85	84	82
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	4	2	2	4	1
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	1	-	-	-
Tidak Wajar	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas	87	88	87	88	83

Sumber. Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021

Tabel 14 Perbandingan Capaian Opini atas LK KKP dengan KL lainnya Tahun 2018-2022

No	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
17	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
20	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	040	Kementerian Pariwisata	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
30	067	Kementerian Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Desa, Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber. Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

Biro Keuangan selaku pengampu indikator kinerja **Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP (Opini)** masih terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan karena masih adanya rekomendasi perbaikan dari BPK terutama untuk sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Upaya yang telah dilakukan Biro Keuangan dalam mendukung keberhasilan pencapaian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian antara lain :

1. Pengawasan terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melakukan pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban belanja secara cermat.
2. Memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan tiap unit kerja KKP berjalan sesuai harapan, melalui penerapan manajemen risiko secara konsisten, serta melibatkan tim Inspektorat Jenderal untuk memberikan kepastian yang independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
3. Identifikasi permasalahan prioritas yang harus segera diselesaikan terkait dengan: Pengelolaan PNBP; Penganggaran dan realisasi belanja; Pertanggungjawaban belanja barang (Perjadin); Penatausahaan kas dan Rekening , Pertanggungjawaban uang muka kerja; Penyajian Akuntansi (PYMHD, Piutang, Hibah); Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindah-tanganan, Penghapusan Aset Tetap/Aset Lainnya.
4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
5. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Lingkup KKP
6. *Helpdesk* Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Bulanan Lingkup KKP
7. menyusun rencana aksi dan monitoring secara berkala atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
8. Proaktif dalam menindaklanjuti hasil temuan.

3.2.4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengelolaan keuangan adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan entitas yang transparan dan akuntabel dalam periode tertentu pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

Dimensi indeks pengelolaan keuangan terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, penetapan kerugian negara dengan penjelasan sebagai berikut:

Transparansi pengelolaan keuangan

Dimensi transparansi pengelolaan keuangan merupakan digitalisasi penatausahaan dokumen pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dimensi transparansi pengelolaan keuangan mencakup beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dokumen
- b. Ketepatan waktu penyampaian; dan
- c. Kesesuaian dokumen

Pengukuran atas kemudahan akses, ketepatan waktu dan kesesuaian tersebut dilakukan terhadap dokumen-dokumen pengelolaan keuangan negara dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban, namun untuk tahun 2023 dokumen yang akan diukur adalah sebagai berikut:

- i. Laporan keuangan tahunan *unaudited*
- ii. Laporan keuangan tahunan *audited*
- iii. Laporan keuangan semesteran

Penentuan skor masing-masing indikator diukur dengan cara sebagai berikut:

- Ketersediaan diukur berdasarkan ketersediaan dokumen dalam media penyimpanan dokumen berbasis daring yang ditentukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- Ketepatan waktu diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian dokumen sesuai target pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen

No	Unit Organisasi	Jadwal Penyampaian		
		Tahunan Unaudited*	Tahunan Audited**	Semesteran***
1	UAPA	28 Februari 2023	12 Mei 2023	31 Juli 2023

Keterangan:

* Berdasarkan surat Dit. APK nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2023

** Berdasarkan surat Dit. APK nomor S-14/PB/PB.6/2023 tanggal 3 April 2023

*** Berdasarkan surat Dit. APK nomor S-21/PB/PB.6/2023 tanggal 5 Juli 2023

- Kesesuaian dokumen diukur berdasarkan kesesuaian dokumen yang disampaikan dengan periode penyampaian pelaporan

Penyerapan anggaran

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan negara. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan siklus APBN yang dimulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Dimensi penyerapan anggaran terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran belanja gaji dan tunjangan (511)
- Penyerapan anggaran belanja honorarium/lembur/tunjangan khusus (512)
- Penyerapan anggaran belanja barang (521)
- Penyerapan anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (526)
- Penyerapan anggaran belanja modal peralatan dan mesin (532)
- Penyerapan anggaran belanja modal gedung dan bangunan (533)

Penetapan kerugian negara

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Informasi terjadinya kerugian negara dapat berasal dari beberapa sumber, namun yang menjadi objek perhitungan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
- Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan

Capaian indeks pengelolaan keuangan yang merupakan IK baru di tahun 2023 dan tidak memiliki capaian terhadap Renstra 2024. Capaian IPK tahun 2023 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 16 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan tahun 2023

SK1 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga		IK 4 : Indeks Pengelolaan Keuangan				
Realisasi 2021-2022			Realisasi 2023		Renstra Tahun 2020-2024	
2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra
-	-	0,65	0,81	124,62	0,67	-

Capaian ini sudah melampaui target dengan didapatkan dari perhitungan di bawah ini:

Transparansi Pengelolaan Keuangan

Tabel 17 Perhitungan indikator ketersediaan pada sebuah entitas pelaporan

No.	Nama Dokumen	Ketersediaan						Keterangan
		Tgl Pengesahan	Tgl Unggah	Rentang Waktu	Batas Akhir Unggah	Sesuai/ Tdk Sesuai	Nilai	
1	Laporan Keuangan Tahunan Unaudited	28 Februari 2023	3 Maret 2023	3	30	S	1	
2	Laporan Keuangan Tahunan Audited	12 Mei 2023	12 Juli 2023	61	30	TS	0	
3	Laporan Keuangan Semesteran	31 Juli 2023	22 September 2023	51	30	TS	0	
Total							1	
Rata-Rata							0,33	

Tabel 18 Perhitungan indikator ketepatan waktu dan kesesuaian untuk sebuah entitas pelaporan

No.	Nama Dokumen	Ketepatan Waktu					Kesesuaian	Keterangan
		Tgl Pengesahan	Tgl Penyampaian	Rentang Waktu	Sesuai/Tdk Sesuai	Nilai		
1	Laporan Keuangan Tahunan Unaudited	28 Februari 2023	28 Februari 2023	0	S	1	1	
2	Laporan Keuangan Tahunan Audited	12 Mei 2023	12 Mei 2023	0	S	1	1	
3	Laporan Keuangan Semesteran	31 Juli 2023	31 Juli 2023	0	S	1	1	
Nilai						3	3	
Rata-Rata						1	1	

Tabel 19 Penghitungan Capaian Kementerian

No.	Nama Entitas	Ketersediaan		Ketepatan Waktu		Kesesuaian		Total Skor	Total Indikator	Keterangan
		Skor	Jml Indikator	Skor	Jml Indikator	Skor	Jml Indikator			
1	Biro Keuangan	2	3	3	3	3	3	1	9	
Skor Kementerian								(8/9) = 0,78		

Penetapan Kerugian Negara

Informasi kerugian negara per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua), sedangkan informasi kerugian negara yang terjadi pada tahun 2023 adalah sebanyak 14 (empat belas). Dari informasi kerugian negara tersebut yang telah ditetapkan selama tahun 2023 adalah sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan), sehingga perhitungan indikator penetapan kerugian negara adalah sebagai berikut:

$$\frac{148 \text{ informasi yang telah ditetapkan}}{256 \text{ informasi terjadinya kerugian negara}} = \mathbf{0,58}$$

Penyerapan Anggaran

Tabel 20 Perhitungan Capaian Penyerapan Anggaran

No.	Indikator	Tar get	Pencapai an	Ni lai	Keterang an
1	Penyerapan anggaran belanja gaji dan tunjangan (511)	> 80%	98,29%	1	
2	Penyerapan anggaran belanja honorarium/lembur/tunjangan khusus (512)	> 80%	98,68%	1	
3	Penyerapan anggaran belanja barang (521)	> 80%	97,67%	1	
4	Penyerapan anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (526)	> 80%	97,31%	1	
5	Penyerapan anggaran belanja modal peralatan dan mesin (532)	> 80%	99,26%	1	
6	Penyerapan anggaran belanja modal Gedung dan bangunan (533)	> 80%	98,94%	1	
Total				6	
Rata-Rata				1	

Tabel 21 Data Realisasi dari aplikasi OM SPAN tanggal 2 Januari 2024

No.	Indikator	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Penyerapan anggaran belanja gaji dan tunjangan (511)	918.805.264.000	903.120.707.738	98,29
2	Penyerapan anggaran belanja honorarium/lembur/tunjangan khusus (512)	882.195.715.000	870.520.094.639	98,68
3	Penyerapan anggaran belanja barang (521)	1.470.158.026.000	1.435.849.860.098	97,67
4	Penyerapan anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (526)	618.130.671.000	601.509.473.652	97,31
5	Penyerapan anggaran belanja modal peralatan dan mesin (532)	390.117.026.000	387.247.340.148	99,26
6	Penyerapan anggaran belanja modal Gedung dan bangunan (533)	200.578.851.000	198.458.389.471	98,94

Pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan

$$\text{Indeks Pengelolaan Keuangan} = (0,78 \times 60\%) + (0,58 \times 15\%) + (1 \times 25\%)$$

Keuangan

$$= 0,47 + 0,09 + 0,25 = 0,81$$

3.2.5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Tingkat Kepatuhan BMN Setjen

Tingkat kepatuhan BMN adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan terhadap tingkat kepatuhan BMN dilakukan pada akhir tahun. Sekretariat Jenderal mampu menjaga capaian nilai Tingkat Kepatuhan BMN Tahun 2022. Berdasarkan perhitungan Inspektorat Jenderal, diperoleh nilai Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 sejumlah 100,00% dari target capaian 80,00%. Tingkat Kepatuhan BMN tidak memiliki capaian terhadap Renstra tahun 2024.

Tabel 22 Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN Setjen 2023

SK1		: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga				
IK 5		: Tingkat Kepatuhan BMN Setjen				
Realisasi 2021 - 2022			Realisasi 2023		Renstra Tahun 2020-2024	
2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
67,5	100	80	100	125,00	80	-

Capaian tahun ini kembali menunjukkan bahwa Biro Keuangan bersama dengan satuan kerja Biro Umum dan PBJ, BLU LPMUKP, dan BPISDKP serta unit kerja Eselon II lain dapat menjaga capaian tahun sebelumnya dengan melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan BMN. Biro Keuangan selaku UAPPB-E1 Sekretariat Jenderal telah berupaya memberikan pelayanan pengelolaan BMN yang optimal kepada satuan kerja lingkup Sekretariat Jenderal, mulai dari pengusulan PSP BMN, penatausahaan BMN, hingga pelaporan.

Adapun capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
 - b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
 - d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
 - e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
2. Berdasarkan hasil evaluasi Itjen, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup KKP mencapai nilai rata-rata sebesar 92,44% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 77,50% s.d. 81%. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan

Nilai Tingkat Kepatuhan BMN dari masing-masing unit eselon I disampaikan sebagai berikut:

Tabel 23 Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Organisasi Eselon I 2023

No	Unit Eselon I	Target	Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN	% Capaian
1	Setjen	80.00	100.00	125.00%
2	BPPSDMKP	77.50	90.00	116.13%
3	DJPT	77.50	80.00	103.23%
4	DJPSPDKP	77.50	100.00	129.03%
5	DJPB	77.50	90.00	116.13%
6	DJPKRL	77.50	85.00	109.68%
7	DJPDSPKP	77.50	97.50	125.81%
8	BPPMHKP	77.50	100.00	129.03%
9	Itjen	81.00	90.00	111.11%

3. Terkait pencapaian di atas, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain:

- a. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- b. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- c. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- d. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- e. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- f. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP

3.2.6. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

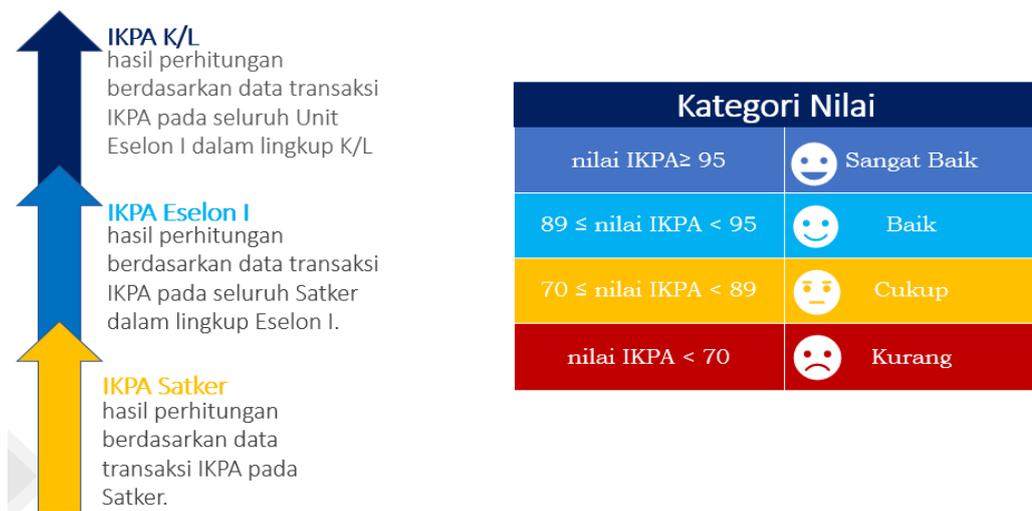
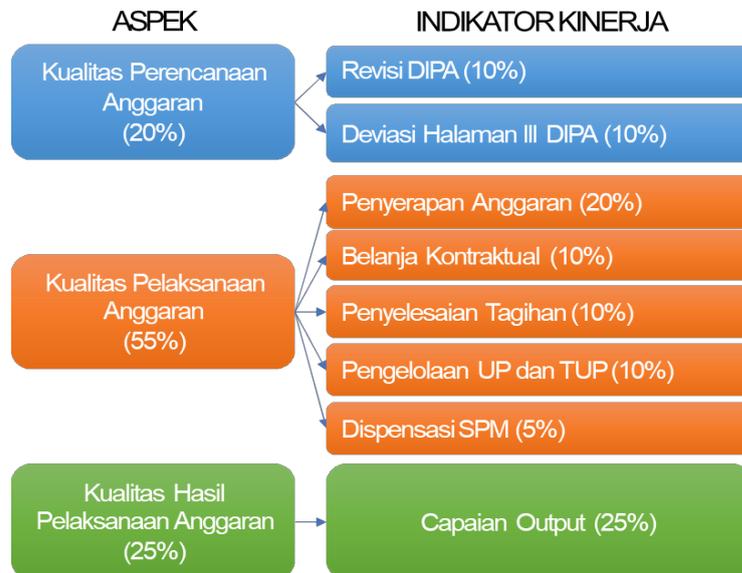
IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.

Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Cakupan pengukuran nilai IKPA meliputi tiga aspek, diantaranya:

1. Pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA;
2. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA;
3. Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Adapun formula dalam penilaian nilai akhir IKPA dan bobot dari setiap indikator IKPA, sebagai berikut:

$$\sum_{n=1}^8 = (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$



Gambar 3 Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada November 2023 terdapat revisi terhadap penetapan target IKPA tahun 2023, yang dimana semula target IKPA 2023 adalah sebesar 89,00, kemudian sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 hal Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024 berubah menjadi:

Tabel 24 Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024

Tahun	Semula	Berubah Menjadi	Kewajiban Pencantuman IKU/PK Pada Tahun 2023 dan 2024
2023	89	93,75	Level 0, Level 1, Level 2 (Satker Pusat, UPT, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
2024	90	93,76	Level 0, Level 1, Level 2 (Satker Pusat, UPT, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

Tabel 25 Perbandingan Capaian IKPA Tahun 2023

SK 1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga							
IK 6		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP (nilai)							
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra Setjen 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
	94,62	93,95	92,15	93,49	93,75	91,99	98,12	93,76	98,11

Berdasarkan pemantauan pada aplikasi OMSPAN per tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan pukul 15.00 WIB, capaian IKPA Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 91,99 atau mencapai 97,06% dari target IKPA KKP Tahun 2023 sebesar 93,75. Adapun rincian capaian IKPA pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar:91,99

Tabel SEQ Tabel \ * ARABIC 14 Capaian IKPA KKP Tahun 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA														
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN														
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN														
Sampai Dengan : DESEMBER														
No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	68.93	85.57	93.10	99.17	95.72	85.00	99.73	91.99	100%	91.99
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	6.89	17.11	9.31	9.92	9.57	4.25	24.93			
			Nilai Aspek	84.47		91.71					99.73			

Apabila dilihat dari tabel di atas, maka capaian pada indikator IKPA KKP yang masih di bawah 90 adalah pada Indikator Deviasi Hal III DIPA, dan Indikator Penyerapan anggaran, adapun hal tersebut disebabkan oleh:

1. Adanya Blokir anggaran pada seluruh Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mulai buka blokir di Bulan Juli dan Agustus 2023, sehingga banyak kegiatan yang sudah direncanakan dilaksanakan di bulan Januari s.d Agustus 2023 tertunda dan mundur, sehingga berpengaruh pada jadwal Penyerapan Anggaran dan berdampak Indikator IKPA pada Deviasi Hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran yang tidak sesuai perencanaan;

Dimana dengan adanya Blokir anggaran, maka satker tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Halaman III DIPA, sehingga antara RPD dengan pelaksanaan penyerapan anggaran tidak sinkron dan mengakibatkan nilai Deviasi Hal III DIPA rendah, dan berpengaruh juga pada proses penyerapan anggaran.

2. Kurangnya koordinasi antara Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Penanggungjawab Kegiatan, sehingga terjadi deviasi pada Hal III DIPA dengan Realisasi anggaran;

Karena adanya ketidakselarasan antara bagian perencanaan, Keuangan, dan Penanggungjawab Kegiatan ikut berpengaruh juga

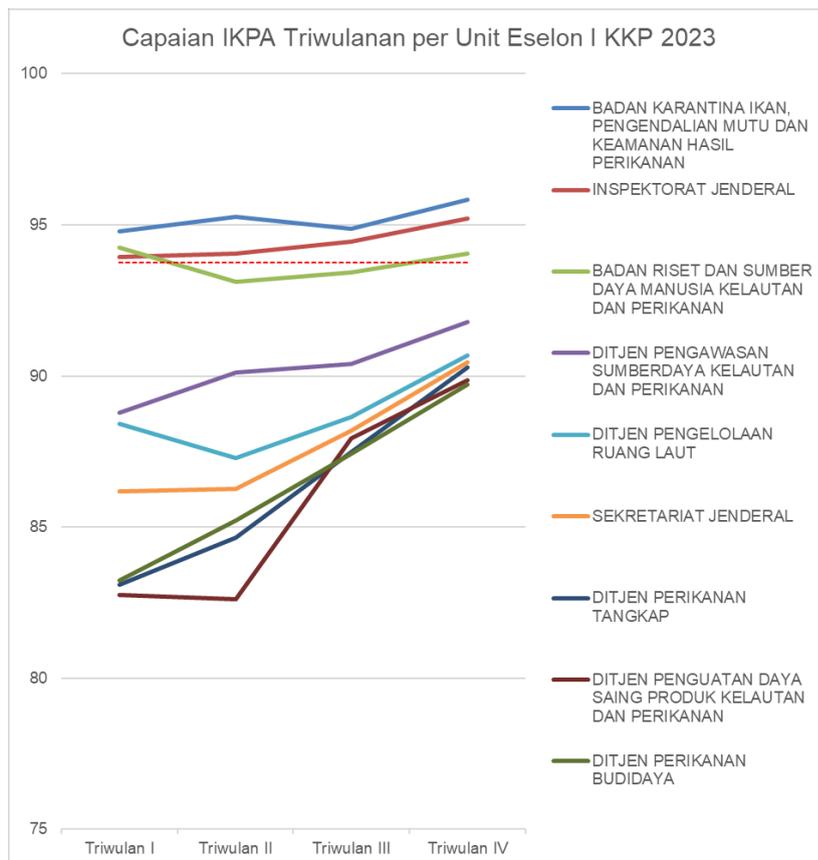
terhadap nilai IKPA, seharusnya apabila tahu ada blokir anggaran antara Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Penanggungjawab Kegiatan berkoordinasi untuk melakukan identifikasi dan mereformulasi/merencanakan lagi kegiatan-kegiatan yang tertunda, serta segera merevisi Hal III DIPA agar nilainya indikator Deviasi Hal III DIPA IKPA tidak terlalu rendah.

3. Proses Pengadaan barang/Jasa yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal/jadwal yang ditetapkan.

Sedangkan untuk capaian nilai IKPA KKP tahun 2023 apabila dirinci per Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Capaian IKPA KKP Tahun 2023 Per Unit Eselon I

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN															
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN															
Sampai Dengan : DESEMBER															
No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	03213	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	74.24	96.89	94.24	99.61	96.82	100.00	99.92	95.85	100%	95.85	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	7.42	19.38	9.42	9.96	9.68	5.00	24.98				
			Nilai Aspek	87.12					97.51						99.92
2	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	66.26	96.47	94.00	100.00	98.95	100.00	100.00	95.22	100%	95.22	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	6.63	19.29	9.40	10.00	9.90	5.00	25.00				
			Nilai Aspek	83.13					97.88						100.00
3	03212	BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	72.15	92.30	93.32	98.95	96.44	90.00	100.00	94.05	100%	94.05	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	7.22	18.46	9.33	9.90	9.64	4.50	25.00				
			Nilai Aspek	86.08					94.20						100.00
4	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	65.84	86.50	93.45	99.02	91.64	90.00	99.99	91.79	100%	91.79	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	6.58	17.30	9.35	9.90	9.16	4.50	25.00				
			Nilai Aspek	82.92					92.12						99.99
5	03207	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	69.74	82.28	90.53	98.99	94.38	80.00	99.45	90.68	100%	90.68	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	6.97	16.46	9.05	9.90	9.44	4.00	24.86				
			Nilai Aspek	84.87					89.24						99.45
6	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	56.83	82.40	92.74	99.40	95.89	90.00	100.00	90.47	100%	90.47	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	5.68	16.48	9.27	9.94	9.59	4.50	25.00				
			Nilai Aspek	78.42					92.09						100.00
7	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	63.88	79.69	93.25	99.14	96.26	85.00	99.44	90.30	100%	90.30	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	6.39	15.94	9.33	9.91	9.63	4.25	24.86				
			Nilai Aspek	81.94					90.67						99.44
8	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	59.56	73.95	94.05	100.00	97.20	100.00	100.00	89.87	100%	89.87	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	5.96	14.79	9.41	10.00	9.72	5.00	25.00				
			Nilai Aspek	79.78					93.04						100.00
9	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	62.28	78.12	93.39	99.17	97.52	80.00	99.42	89.71	100%	89.71	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	6.23	15.62	9.34	9.92	9.75	4.00	24.85				
			Nilai Aspek	81.14					89.64						99.42



Gambar 4 Capaian IKPA Triwulanan Unit Eselon I KKP Tahun 2023

Tabel 27 Nilai IKPA K/L Seluruh Indonesia

No	Nama KL	Nilai IKPA 2023
1	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	97,64
2	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	97,54
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	97,48
4	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	96,9
5	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	96,64
6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	96,28
7	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	95,88
8	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	95,69
9	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	95,52
10	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	95,43
11	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	95,39
12	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	95,38
13	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	95,33
14	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	95,27
15	MAHKAMAH AGUNG	95,24
16	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	95,18
17	KEMENTERIAN PERTAHANAN	95,13
18	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	94,79
19	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	94,63
20	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	94,49
21	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	94,46
22	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	94,45
23	BADAN PUSAT STATISTIK	94,39
24	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	94,24
25	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	94,16
26	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	94,06
27	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	93,98
28	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	93,89
29	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	93,89

No	Nama KL	Nilai IKPA 2023
30	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	93,58
31	KEMENTERIAN AGAMA	93,41
32	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	93,33
33	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	93,32
34	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	93,3
35	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	93,29
36	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	93,24
37	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	93,1
38	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	92,97
39	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	92,74
40	BADAN KEAMANAN LAUT	92,65
41	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	92,61
42	KEMENTERIAN PARIWISATA	92,59
43	SEKRETARIAT KABINET	92,56
44	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	92,55
45	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	92,54
46	BADAN INTELIJEN NEGARA	92,52
47	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	92,39
48	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	92,35
49	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	92,32
50	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	92,21
51	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	92,13
52	KEMENTERIAN KESEHATAN	92,12
53	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	92
54	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	91,87
55	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	91,83
56	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	91,69
57	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	91,63
58	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	91,53

No	Nama KL	Nilai IKPA 2023
59	LEMBAGA SANDI NEGARA	91,39
60	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	91,23
61	KEMENTERIAN SOSIAL	91,18
62	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	91,03
63	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	90,9
64	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	90,64
65	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	90,48
66	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	90,45
67	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	89,89
68	KOMISI YUDISIAL RI	89,82
69	KOMISI PEMILIHAN UMUM	89,52
70	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	89,24
71	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	89,04
72	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	88,88
73	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	88,82
74	KEMENTERIAN PERTANIAN	88,4
75	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	88,25
76	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	88,07
77	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	87,48
78	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	87,42
79	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	87,05
80	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	85,07
81	BADAN PANGAN NASIONAL	82,35
82	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	77,05

Sumber: OM SPAN 12 Januari 2024 Pukul 17.12

Beberapa hal yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan guna meningkatkan capaian nilai IKPA pada tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan rapat peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tanggal 6 Oktober 2023, melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh satuan kerja dilingkup Sekretariat

Jenderal, baik ditingkat kantor Pusat, kantor daerah, dan Dekonsentrasi guna membahas Pelaporan Capaian Output bulan September, serta Monitoring Progres Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA, sesuai surat undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.2632/SJ.2/TU.210/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023. Pada kegiatan rapat koordinasi tersebut dibahas mengenai permasalahan dalam peningkatan nilai IKPA, khususnya pada tata cara pengisian capaian output;

2. Pada tanggal 10 Oktober 2023, Biro Keuangan melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang peserta dari Ditjen PSDKP dan Unit Eselon I lainnya dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna pelaksanaan evaluasi pelaksanaan IKPA dilingkungan KKP, serta membahas Evaluasi Capaian IKPA Unit Eselon I Triwulan III Tahun 2023, dan Upaya Peningkatan Capaian IKPA Unit Eselon I Triwulan IV Tahun 2023, sesuai surat undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.2657/SJ.2/TU.330/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023;
3. Melaksanakan rapat peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Sekretariat Jenderal pada tanggal 7 November 2023, sesuai surat undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.2903/SJ.2/TU.330/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
4. Melaksanakan rapat Evaluasi Capaian IKPA pada tanggal 4 Desember 2023 yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perbendaharaan rapat Evaluasi Capaian IKPA Bulan November 2023 membahas Penginputan dan verifikasi capaian output bulan November 2023, serta pengisian capaian Output di Sekretariat Jenderal;
5. Pada bulan Desember 2023, Biro Keuangan juga melaksanakan Evaluasi terhadap Capaian IKPA Triwulan IV dilingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), yang dimana dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan tanggal 5 Desember 2023, melalui Surat Undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.3224/SJ.2/TU.330/XI/2023 tanggal 29 November 2023;

6. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Biro Keuangan dalam rangka peningkatan capaian IKPA di Triwulan IV antara lain:

1) Peningkatan capaian indikator Penyelesaian Tagihan

Dalam rangka peningkatan capaian indikator penyelesaian tagihan, Biro Keuangan melakukan upaya dengan menyampaikan Nota Dinas dan Memorandum kepada seluruh Unit Eselon I dengan melampirkan data kontrak yang berakhir sampai dengan bulan Oktober, November dan Desember 2023. Berdasarkan data kontrak tersebut, Unit Eselon I diharapkan menyampaikan ke Satuan Kerja di lingkungannya dan segera menyelesaikan pertanggungjawaban untuk kontrak yang telah jatuh tempo, mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban untuk kontrak yang akan jatuh tempo, dan melakukan revisi karwas kontrak apabila terjadi adendum kontrak. Berikut beberapa dokumen upaya peningkatan indikator capaian penyelesaian tagihan:

- ✓ Nota Dinas Nomor 1639/SJ.2/TU.210/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 hal Daftar Outstanding Kontrak yang Telah Berakhir sampai dengan September 2023 dan yang Akan Berakhir pada Bulan Oktober 2023;
- ✓ Memorandum Nomor 1640/SJ.2/TU.210/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 hal Daftar Outstanding Kontrak yang Telah Berakhir sampai dengan Bulan September 2023 dan yang Akan Berakhir pada Bulan Oktober 2023;
- ✓ Nota Dinas Nomor 1869/SJ.2/TU.210/XI/2023 tanggal 1 November 2023 hal Daftar Outstanding Kontrak yang Telah Berakhir sampai dengan Bulan Oktober 2023 dan yang Akan Berakhir pada Bulan November 2023;
- ✓ Memorandum Nomor 1868/SJ.2/TU.210/XI/2023 tanggal 2 November 2023 hal Daftar Outstanding Kontrak yang Telah Berakhir sampai dengan Bulan Oktober 2023 dan yang Akan Berakhir pada Bulan November 2023;
- ✓ Nota Dinas Nomor 2070/SJ.2/KU.530/XII/2023 tanggal 1

Desember 2023 hal Daftar Outstanding Kontrak yang Telah Berakhir sampai dengan Bulan November 2023 dan yang Akan Berakhir pada Bulan Desember 2023;

- ✓ Memorandum Nomor 1868/SJ.2/TU.210/XI/2023 tanggal 2 November 2023 hal Daftar Outstanding Kontrak yang Telah Berakhir sampai dengan Bulan Oktober 2023 dan yang Akan Berakhir pada Bulan November 2023;

2) Peningkatan capaian indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Guna peningkatan capaian indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dalam rangka peningkatan capaian indikator Pengelolaan UP dan TUP, Biro Keuangan melakukan upaya dengan menyampaikan Nota Dinas kepada seluruh Unit Eselon I dengan melampirkan data UP dan TUP Satuan Kerja yang akan berakhir di bulan berkenaan. Berdasarkan data UP dan TUP tersebut, Unit Eselon I diharapkan menyampaikan ke Satuan Kerja di lingkungannya dan segera mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban untuk lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) GUP dan PTUP dengan tujuan menghindari pertanggungjawaban yang melampaui batas waktu yang ditentukan. Berikut beberapa dokumen yang dilaksanakan Biro Keuangan dalam upaya peningkatan capaian indikator UP dan TUP baik di Satker sekretariat Jenderal, Ditjen PSDKP, maupun Unit Eselon I lainnya. Yang dimana Nota Dinas maupun memo tersebut sebagai berikut:

- ✓ Menyampaikan Nota Dinas Nomor 1638/SJ.2/TU.210/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 hal Penyampaian Batas Waktu Revolving Uang Persediaan dan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan pada bulan Oktober 2023 pada satuan kerja dilingkungan KKP;
- ✓ Menyampaikan Nota Dinas Nomor 1931/SJ.2/TU.210/XI/2023 tanggal 1 November 2023 hal Penyampaian Batas Waktu Revolving Uang Persediaan dan Pertanggungjawaban

Tambahan Uang Persediaan bulan November 2023;

- ✓ Menyampaikan Nota Dinas kepada Sekretaris DJPKRL Nomor 1933/SJ.2/TU.210/XI/2023 tanggal 8 November 2023 hal Penyampaian Batas Waktu Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan;
- ✓ Menyampaikan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 2069/SJ.2/KU.220/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 hal Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pada Akhir Tahun Anggaran 2023.

3) Peningkatan capaian indikator Deviasi Halaman III DIPA

Dalam rangka peningkatan capaian indikator deviasi halaman III DIPA, Biro Keuangan melakukan upaya dengan menyampaikan Nota Dinas ke seluruh Unit Eselon I dan Memorandum di lingkup Sekretariat Jenderal mengenai batas waktu pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) di halaman III DIPA, dan himbauan untuk merealisasikan anggaran sesuai RPD yang telah ditetapkan. Berikut beberapa dokumen upaya peningkatan capaian indikator Deviasi Halaman III DIPA:

- ✓ Menyampaikan Nota Dinas Nomor 1740/SJ.2/TU.210/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 hal Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2023;
- ✓ Nota Dinas Nomor 1934/SJ.2/TU.210/XI/2023 tanggal 8 November 2023 hal Upaya Peningkatan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bulan Oktober 2023;
- ✓ Nota Dinas Nomor 2107/SJ.2/TU.210/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 hal Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Bulan November 2023.

4) Selain itu Biro Keuangan juga melakukan upaya peningkatan capaian IKPA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui rapat koordinasi dengan mengundang Unit Eselon I dan Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal maupun Unit Eselon I lainnya dilingkungan KKP. Rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui kendala dan mendapatkan solusi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan di lingkup masing-masing Unit Eselon I. Beberapa rapat sebagai upaya peningkatan capaian IKPA antara lain:

- ✓ Pada tanggal 6 Oktober 2023, melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh satuan kerja dilingkup Sekretariat Jenderal, baik ditingkat kantor Pusat, Kantor daerah, dan Dekonsentrasi guna membahas Pelaporan Capaian Output bulan September, serta Monitoring Progres Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA, sesuai surat undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.2632/SJ.2/TU.210/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023. Pada kegiatan rapat koordinasi tersebut dibahas mengenai permasalahan dalam peningkatan nilai IKPA, khususnya pada tata cara pengisian capaian output;
- ✓ Pada tanggal 10 Oktober 2023, Biro Keuangan melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang peserta dari Ditjen PSDKP dan Unit Eselon I lainnya dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna pelaksanaan evaluasi pelaksanaan IKPA dilingkungan KKP, serta membahas Evaluasi Capaian IKPA Unit Eselon I Triwulan III Tahun 2023, dan Upaya Peningkatan Capaian IKPA Unit Eselon I Triwulan IV Tahun 2023, serta dibahas juga permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan IKPA, sesuai surat undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.2657/SJ.2/TU.330/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023;
- ✓ Pada tanggal 7 November 2023, Biro Keuangan melaksanakan Evaluasi Capaian IKPA Unit Eselon I KKP, Sesuai undangan Sekretaris Jenderal Nomor B.2903/SJ.2/TU.330/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 membahas Evaluasi Capaian IKPA Unit Eselon

I Bulan Oktober 2023 dan Upaya Peningkatan Capaian IKPA Unit Eselon I Bulan November Tahun 2023;

- ✓ Sesuai undangan Sekretaris Jenderal Nomor B.3224/SJ.2/TU.330/XI/2023 tanggal 29 November 2023 membahas Evaluasi Capaian IKPA bulan November 2023, Upaya Peningkatan Capaian IKPA terkait Langkah- Langkah Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Pengawasan Belanja Kontraktual Yang Jatuh Tempo di Akhir Tahun Anggaran 2023.
- ✓ Sesuai undangan Sekretaris Jenderal Nomor 2903/SJ.2/TU.330/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 membahas Evaluasi Capaian IKPA Unit Eselon I Bulan Oktober Tahun 2023 dan Upaya Peningkatan Capaian IKPA Unit Eselon I Bulan November Tahun 2023; Sesuai undangan Sekretaris Jenderal Nomor B.3225/SJ.2/TU.330/XI/2023 tanggal 29 November 2023 membahas Penginputan Capaian Output bulan November 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran pada Akhir Tahun 2023;
- ✓ Pada tanggal 4 Desember 2023, Biro Keuangan melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh operator SAKTI Modul Komitmen/Modul PPK dan Bendahara Pengeluaran dilingkup Sekretariat Jenderal dalam upaya Penginputan Capaian Output bulan November 2023, sesuai Surat undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.3225/SJ.2/TU.330/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
- ✓ Pada tanggal 5 Desember 2023, Biro Keuangan melaksanakan rapat koordinasi dengan Ditjen PSDKP, dan seluruh Unit Eselon I dilingkungan KKP dalam rangka membahas:
 1. Evaluasi Capaian IKPA bulan November 2023;
 2. Upaya Peningkatan Capaian IKPA terkait Langkah- Langkah Akhir Tahun Anggaran 2023;
 2. Pengawasan Belanja Kontraktual Yang Jatuh Tempo di Akhir Tahun Anggaran 2023, yang dimana pelaksanaannya Sesuai Surat undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.3224/SJ.2/TU.330/XI/2023 tanggal 29 November 2023;

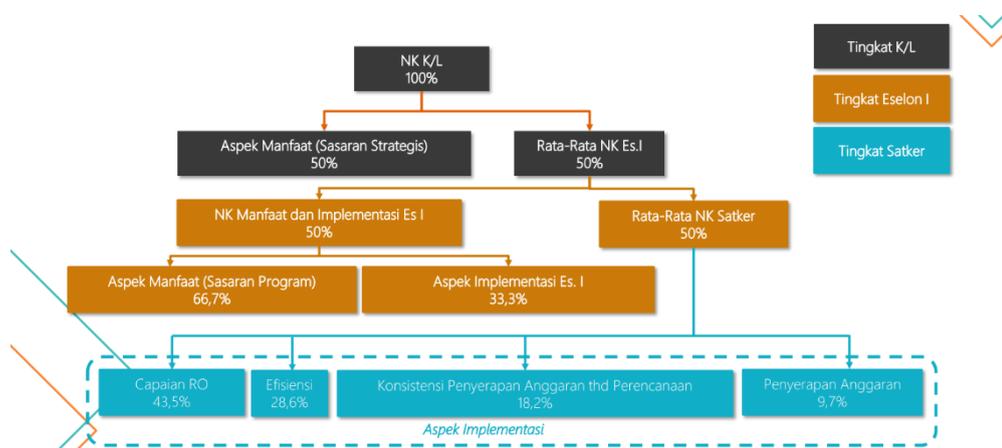
- ✓ Pada tanggal 14 Desember 2023, Biro Keuangan melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh operator SAKTI Modul Komitmen/Modul PPK dan Bendahara Pengeluaran pada Satker seluruh Unit Eselon I KKP dalam upaya Optimalisasi Capaian IKPA Tahun 2023, dan Persiapan Penginputan Capaian Output bulan Desember Tahun 2023, sesuai Surat undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.3351/SJ.2/TU.330/XI/2023 tanggal 13 Desember 2023.

3.2.7. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setjen

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil dari penilaian atas kinerja anggaran yang diukur melalui aplikasi SMART DJA. Nilai kinerja anggaran tersebut diukur dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
2. Aspek manfaat adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.
3. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi Kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah

Secara rinci dapat dilihat pada gambar 5 atas penilaian dari masing – masing aspek dan besaran bobot per level sebagai pembentuk dari capaian NKA:



Gambar 5 Proporsi Penilaian Kinerja Anggaran Per Level

Dari gambar 5 di atas, berikut perhitungan per indikator dari masing – masing aspek per level sebagai pembentuk dari capaian NKA:

Tabel 28 Bobot Per Indikator Atas Aspek Penilaian Kinerja Anggaran Per Level

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I				Perhitungan NK KL		
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot		Indikator	Bobot	
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%	
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %		50%	Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %			Nilai Kinerja KL	Total
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %				
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Kinerja Program		66,67%			
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata		50%				
			Nilai Kinerja Unit Eselon I			Total			

Target NKA tahun 2023 dihitung pada akhir tahun dengan target 86,00 di level Unit Eselon I dan 82,00 di level satuan kerja sesuai dengan Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 51/SJ.2/RC.610/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 hal Target Indikator Kinerja (IK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

KATEGORI NILAI		
NK > 90%		Sangat Baik
80% < NK ≤ 90%		Baik
60% < NK ≤ 80%		Cukup
50% < NK ≤ 60%		Kurang
NK ≤ 50%		Sangat Kurang

Gambar 6 Kategori Penilaian NKA

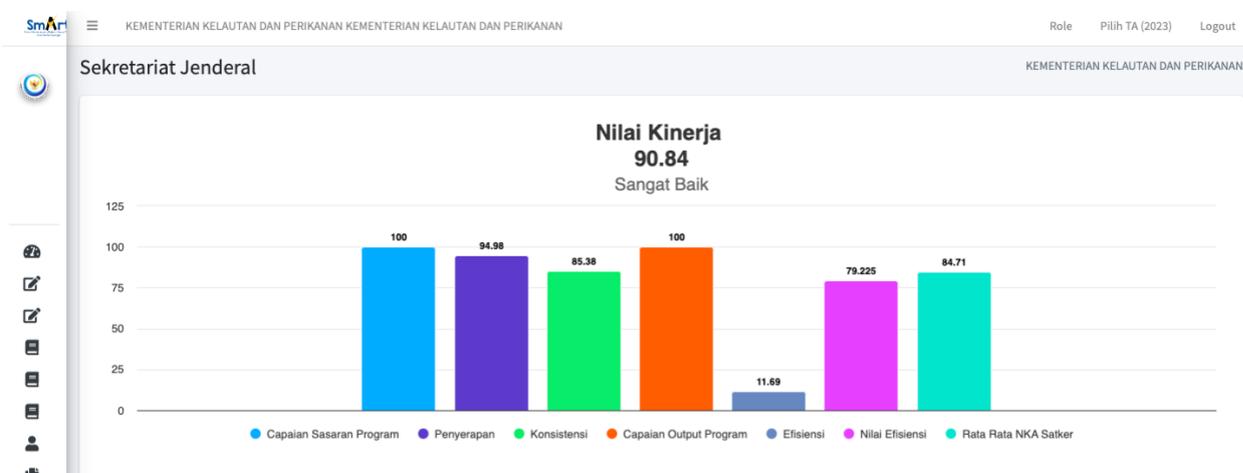
Dalam rangka menjaga ketercapaian capaian NKA lingkup KKP, Biro Keuangan telah melaksanakan kegiatan peningkatan capaian NKA pada triwulan IV tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan *benchmarking* dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan terkait dengan money NKA di lingkungan Kementerian Keuangan arah kebijakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2024 sehubungan dengan telah terbitnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 pada tanggal 20 November 2023 di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta.

2. Melaksanakan kegiatan Monev NKA KKP triwulan IV tahun 2023 di Ruang Rapat (RR) Biro Keuangan pada tanggal 28 Desember 2023.

Berdasarkan pemantauan NKA triwulan IV tahun 2023 pada aplikasi SMART DJA pada tanggal 10 Januari 2024, nilai kinerja anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 90,84 dengan kategori sangat baik dan sebagian besar seluruh satker lingkup Setjen telah mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar 7 Realisasi NKA Sekretariat Jenderal

Realisasi NKA tersebut ditetapkan dengan Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 83/SJ.2/TU.210/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV tahun 2023 sebagai dasar penginputan pada aplikasi Kinerja atas capaian IKU NKA lingkup Setjen tahun 2023.

Berdasarkan realisasi NKA di atas maka capaian Indikator Kinerja NKA Sekretariat Jenderal mengalami kenaikan sebesar 3,6% dari capaian tahun 2022. Kenaikan capaian NKA lingkup Setjen dari tahun sebelumnya disebabkan adanya perubahan manual perhitungan output program pada indikator persentase pencapaian target PNBPN BLU dan persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP.

Tabel 29 Perbandingan Capaian NKA tahun 2023

SK 1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga										
IK 7 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setjen										
Realisasi					2023				Renstra Setjen 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Naik/ Turun 2022 - 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra 2024
-	87,79	85,68	89,10	87,73	86,00	90,84	105,62	3,6	88	103,22

Capaian NKA Setjen mencapai 90,84 dari target 86,00. Capaian ini melampaui target tetapi masih belum optimal dan akan dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya. Perbaikannya antara lain::

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi satker dalam merubah data Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI atas capaian realisasi anggaran setiap bulannya terutama pada level satker Dekonsentrasi. Dimana bobot konsistensi sebesar 18,2%.
2. Perubahan target kinerja pada Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Output Program dan Rincian Output tidak di ikuti perubahan pada aplikasi Krisna dan aplikasi SAKTI sehingga pembagi realisasi menggunakan target awal sedangkan ditahun berjalan terdapat kebijakan yang mempengaruhi perubahan target – target yang telah ditetapkan.
3. Masih rendahnya partisipasi pelaksana kegiatan menyampaikan progres Capaian Rincian Output (CRO) kepada operator yang menangani capaian output pada aplikasi SAKTI sehingga berdampak pada kurang tepatnya dalam penginputan CRO satker, dimana bobot dari CRO sebesar 43,5%.
4. Terdapat perubahan proses bisnis proses dalam hal penginputan CRO pada level satker, dimana operator SMART DJA tidak dapat melakukan koreksi atas kurang tepatnya CRO yang telah di input pada

aplikasi OM SPAN sehingga berdampak pada kurang tepatnya data CRO pada aplikasi SMART DJA.

Dalam rangka mempersiapkan NKA tahun 2024 Biro Keuangan telah berkoordinasi dengan Ditjen Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan, berdasarkan hasil rapat arah kebijakan NKA tahun 2024 dapat diketahui bahwa akan ada reformulasi penilaian dan pengukuran NKA pada tahun 2024 hal ini berkaitan dengan terbitnya PMK 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan dimana diatur lebih lanjut terkait dengan NKA dalam BAB VIII tentang Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran. Berkenaan hal tersebut rencana aksi yang akan dilakukan Biro Keuangan dalam menjaga akan tercapainya capaian NKA antara lain:

1. Berkoordinasi dengan DSP Kementerian Keuangan terkait dengan turunan dari peraturan PMK 62 tahun 2023 atas pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran.
2. Melakukan sosialisasi terkait dengan turunan turunan dari peraturan PMK 62 tahun 2023 jika telah tersedia.
3. Melakukan penyesuaian atas manual IKU, target dan pohon kinerja NKA untuk tahun 2024 sesuai dengan kebijakan terbaru.

3.2.8. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2022 (persen)

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Obyek dari capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN” adalah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada periode pengukuran.

Laporan Keuangan KKP setiap tahun selalu direview oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal dan diperiksa secara seksama oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah yaitu BPK-RI. Pengawasan dan pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *good governance* agar pelaksanaan berjalan akuntabel dan transparan.

Penilaian capaian ini dilaksanakan setahun sekali dan diukur dari besarnya persentase nilai temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran Setjen TA 2022 dengan target capaian sebesar maksimal tidak melebihi 1% dengan perhitungan sebagaimana tabel berikut:

$$\text{FORMULA} : \frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA yang disajikan pada LHP atas Kepatuhan}}{\text{Realisasi riil TA}} \times 100 \% = \text{Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen Tahun Anggaran}$$

Keterangan :

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA 2022 (*audited*) tidak melebihi 0.5 %

Capaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN

IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA 2022 sudah dapat dihitung capaian IKU-nya pada periode Triwulan III 2023 mengacu pada perhitungan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP TA 2022 Nomor 15b/LHP/XVII/05/2023 yang terbit pada tanggal 23 Mei 2023.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, dimana masih terdapat kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 15b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023. Atas Temuan pemeriksaan BPK RI atas LK KKP Tahun 2022 tersebut, terdapat unsur kelemahan yang menjadi temuan pada Satuan Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal yaitu:

1. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri Satuan Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal diketahui terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran uang harian senilai Rp38.200.599,00 atau 0,01% dari realisasi sebesar Rp522.851.112.169,00 yang diakibatkan oleh:

- a. tidak memperhitungkan pembayaran uang harian untuk waktu perjalanan yang diberikan paling tinggi sebesar 40% dari tarif uang harian; dan
- b. tidak memperhitungkan biaya akomodasi yang ditanggung oleh pihak pengundang/penyelenggara. Sesuai ketentuan, dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh pengundang/pihak penyelenggara/pihak di luar negeri maka uang harian diberikan paling tinggi 30% dari tarif.

2. Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Enam Satuan Kerja Tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang terdapat temuan berupa Pertanggungjawaban belanja konsumsi pada Satuan Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal tidak sesuai ketentuan senilai Rp30.281.900,00 atau 0,01% dari realisasi sebesar Rp522.851.112.169,00 diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Realisasi kegiatan jamuan makan tahun 2021 senilai Rp4.017.400,00 dibayar menggunakan Uang Persediaan tahun 2022. Adapun belanja tahun 2021 tersebut seharusnya tidak dapat dibayarkan menggunakan uang persediaan tahun 2022 karena dalam Laporan Keuangan tidak dicatat sebagai utang belanja barang pada Neraca Tahun 2021
- b. Pertanggungjawaban belanja konsumsi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp26.246.500,00.

Berkenaan dengan temuan di lingkup Sekretariat Jenderal pada Tahun 2022 tidak ada yang bernilai material maka capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran

Sekretariat Jenderal TA. 2022” adalah sebesar 0,01% (target yang ditetapkan sebesar $\leq 0,5\%$).

Pada Triwulan IV ini Biro Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai strategi untuk mendukung IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan Rapat Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Rapat diselenggarakan pada hari 04 Desember 2023 Pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Biro Keuangan, Gedung Mina Bahari IV Lantai 3B. Kegiatan Rapat dibuka dan dipimpin Ketua Tim Kerja Tindak Lanjut, serta dihadiri oleh Tim Unit Eselon II serta Tim Biro Keuangan. Agenda pembahasan dalam rapat ini adalah pemantauan dan evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK RI pada Unit Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal khususnya untuk temuan dalam status Belum Sesuai dan Belum Ditindaklanjuti untuk LHP BPK RI atas LK Tahun 2012 s.d. 2022.

Tabel 30 Dokumentasi Rapat Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan di atas, diharapkan Capaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA 2022 dapat tercapai maksimal yaitu 1%.

Perbandingan perkembangan capaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN

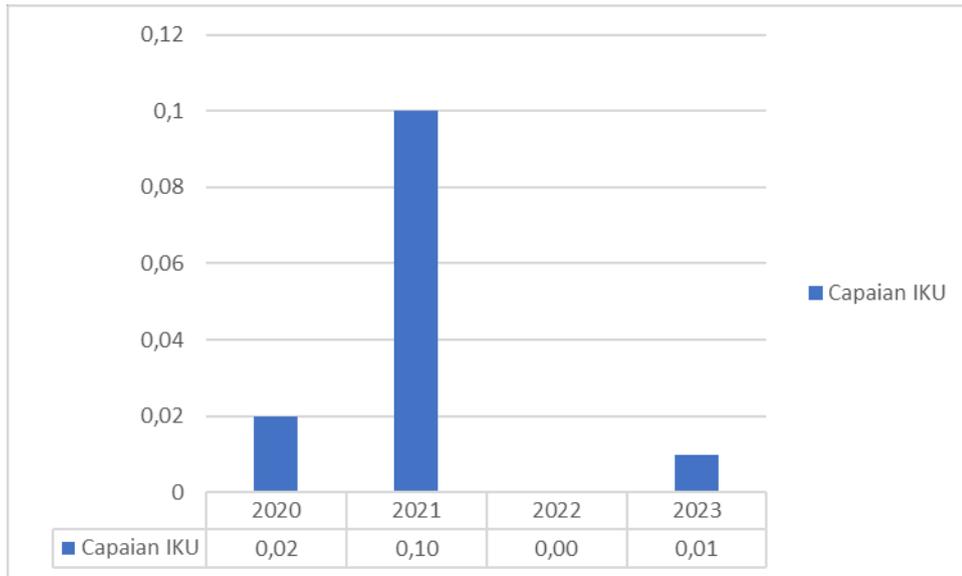
Membandingkan hasil capaian IKU TA 2020, Triwulan 2021, TA 2022 dengan TA. 2023 diketahui bahwa Setjen dapat mempertahankan capaian IKU sesuai target yaitu tidak melebihi 1%. Pada TA 2023, IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN berhasil dicapai sebesar 0,01%.

Capaian IKU 0,01% ini tidak lepas dari perhatian penuh Pimpinan di Unit Kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal sehingga dapat menyelesaikan temuan secara tuntas. rekomendasi secara tuntas dalam periode penilaian.

Progres penyelesaian Capaian IKU yang dilaksanakan per tahun sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 31 Perbandingan Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN”

SK 1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga							
IK 8		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN Tahun Anggaran 2022							
Realisasi 2019-2023					2023			Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target 2024	% Capaian thd Target akhir Renstra
	0,02	0,1	0	0.01	0.5	0,01	100	< 0.5	100



Gambar 8 Progres Perbandingan Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN”

Kendala/Permasalahan dalam pencapaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN

Tidak terdapat kendala/permasalahan yang berarti dalam penyelesaian tindak lanjut capaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN pada Triwulan IV Tahun 2023 ini sehingga secara keseluruhan memenuhi target. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja keras Pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal baik dalam melakukan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi temuan berulang maupun dalam melakukan penyelesaian temuan dengan menindaklanjuti segera mungkin sesuai rekomendasi.

Strategi dalam Pencapaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN

Strategi dalam pencapaian target IKU di Triwulan ini adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan rapat secara rutin untuk memantau penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. mengundang Eselon II jika terbit LHP baru untuk mengklarifikasi temuan dan tindak lanjut apa yang paling tepat untuk menyelesaikan rekomendasinya serta menyusun *timeline* penyelesaian rekomendasi;
3. melaksanakan langkah-langkah aksi penyelesaian rekomendasi sesuai dengan *timeline* yang disepakati;
4. Tim tindak lanjut bekerjasama dengan Unit Eselon II sebagai mitra Sekretariat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terkait kendala dan kesulitan yang dihadapi mitra dalam melakukan tindak lanjut serta membahas solusi bersama apabila terdapat LHP yang tidak dapat ditindak lanjuti.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perbaikan pencapaian pencapaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN

Dalam hal evaluasi pelaksanaan pencapaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN, kiranya perlu memperhatikan beberapa langkah perbaikan serta strategi penyelesaian rekomendasi tersebut, diantaranya:

1. Mempelajari temuan-temuan yang ada pada LHP yang terbit dan membahas bersama dengan seluruh Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal agar saling memahami permasalahan yang menimbulkan temuan untuk mencegah munculnya kondisi yang sama agar tidak terjadi temuan berulang.
2. Membahas bersama konsep temuan yang disampaikan oleh Tim BPK RI dengan seluruh Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal, walaupun pemeriksaan hanya pada satu Unit Eselon II Sekretariat Jenderal, agar rekomendasi dapat diselesaikan bersama dan menjadi pembelajaran Unit Kerja lainnya agar tidak terjadi temuan berulang, terutama jika obyek menyangkut Unit Eselon II ataupun rekomendasi yang muncul membutuhkan tindak lanjut dari Unit Eselon II lainnya.

3.2.9. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (level)

Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Capaian IKU diukur dengan membandingkan Nilai level maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup KKP dengan Target level maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup KKP yang dilaksanakan setahun sekali.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan pada 9 Unit Kerja Eselon I, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
6. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
8. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
9. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Adapun pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Pembahasan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP KKP oleh Tim Evaluator BPKP, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas pada tanggal 5 Desember 2023. Hasil pembahasan tersebut menyebutkan bahwa Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,561 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga).

Tabel 32 Level Maturitas SPIP KKP (Level)

SK 1	: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga										
IK 9	Level Maturitas SPIP KKP (Level)										
Realisasi 2017– 2022							Realisasi Tahun 2023		Renstra Tahun 2020 – 2024		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra	
-	-	3	3	3	3	3	3	100	3	100	



**BERITA ACARA PEMBAHASAN
HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Proses)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Tahap	Capaian	Bobot	Nilai
Persiapan	59,33%	20,00%	11,87%
Pelaksanaan	97,06%	60,00%	58,24%
Pelaporan	73,84%	20,00%	14,77%
Skor			84,87%

Catatan Evaluasi atas Proses:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 59,33% (lima puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) atau 11,87% dari bobot 20%. Hal ini disebabkan:
 - 1) Jumlah assesor yang menilai maturitas SPIP untuk satu assesor menilai lebih dari 1 satker;
 - 2) Kurang dari sepertiga tim asesor yang telah mengikuti bimtek SPIP.

3) Waktu pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang terlambat dimulai; dan

4) Kurangnya bimbingan oleh tim koordinator Penilaian Mandiri terhadap petugas penilaian mandiri di masing-masing eselon I sehingga terdapat kesalahan saat menginput di aplikasi e-SPIP.

b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 97,06% (sembilan puluh tujuh koma nol enam persen) atau 58,24% dari bobot 60%. Hal ini disebabkan pelaksanaan pada tahap ini terdapat beberapa kesalahan saat penginputan pada aplikasi e-SPIP.

c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 73,84% (tujuh puluh tiga koma delapan empat persen) atau 14,77% dari bobot 20%. Belum maksimalnya skor pada tahapan ini disebabkan:

- 1) Rekomendasi yang diberikan belum membuat peningkatan satu level di atasnya;
- 2) Kertas kerja penilaian ada namun tidak lengkap dan masih banyak kesalahan penginputan di aplikasi karena kesalahan pada kertas kerja.

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,561 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga).

b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,548 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (tiga).

c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,440.

Fokus Penilaian	Hasil PM	Hasil PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,317	4,051	3,561	Turun
MRI	4,670	3,975	3,548	Turun
IEPK	4,910	3,710	3,440	Turun

Demikian berita acara hasil evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2023

Ketua Tim Asesor Kementerian,
Kepala Biro Keuangan



Ketua Tim PK Kementerian,
Inspektur I



Tim Evaluasi

1. Hermaji
2. Eko Cahyono
3. Prima Aji Prastomo
4. Ita Miranda E. Turnip



Gambar 9 Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada KKP

Tabel 33 Perbandingan Nilai Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan SDA BPKP

Fokus Penilaian	Hasil PM	Hasil PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,317	4,051	3,561	Turun
MRI	4,670	3,975	3,548	Turun
IEPK	4,910	3,710	3,440	Turun

Telah dilaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk dilakukan Pembahasan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Area of Improvement (Aoi) atas hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Kementerian KKP bersama dengan BPKP pada tanggal 5 s.d. 6 Desember 2023.

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penilaian maturitas SPIP yaitu untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Aoi yang telah disusun perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan seluruh pihak terkait dalam rekomendasi BPKP. Sedangkan rencana aksi dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu berkoordinasi dengan Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal dan Unit eselon I yang menangani SPIP maupun perencanaan untuk melaksanakan Tindak Lanjut atas Rencana Aksi Aoi atas hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP



Gambar 10 Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Area of Improvement (Aoi)

3.2.10. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen (persen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal.

Obyek capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen adalah rekomendasi yang terbit pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi Inspektorat Jenderal pada periode pengukuran.

Penilaian capaian ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Eselon 2 di lingkup Sekretariat Jenderal secara tuntas dengan target capaian sebesar minimal 75% selama periode pengukuran.

Penilaian capaian ini dilaksanakan per triwulan dengan perhitungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 34 Formula Perhitungan IKU

Jumlah Rekomendasi:

$$: \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

- $\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti oleh unit Eselon I
- $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit Eselon I

Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV TA 2023.

LHP Inspektorat Jenderal yang menjadi sasaran capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal periode Triwulan IV Tahun 2023 adalah Laporan Hasil Audit yang terbit pada bulan Oktober 2022 s.d September 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan 30 Desember 2023.

Pada periode ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa kali audit di lingkup Sekretariat Jenderal dengan hasil audit dalam LHA yang terbit sebagai berikut:

Tabel 35 Daftar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang menjadi target penilaian capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2023

NO	Unit Kerja	Laporan Hasil Audit	Jumlah Rekomendasi
1	Biro Umum dan PBJ	SHE HSP Tambah dan Volume Pekerjaan Kurang pada Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Inspektorat Jenderal KKP Lantai 2 dan 4 GMB III terkait PBJ TA 2022 oleh Biro Umum dan PBJ	2
2	Biro Keuangan	SHE Implementasi MR TA 2023 Pada Satker Lingkup Setjen	1
3	Biro Keuangan	SHR PIPK Tahun 2022 Lingkup Setjen	3
4	LPMUKP	SHR LK LPMUKP (BA BUN 999.03) Tahun 2022	1
5	Biro Umum dan PBJ	SHR Pembayaran Jeda Waktu Sewa Pemanfaatan BMN pada BUPBJ Setjen KKP	2
6	Pusdatin	Hasil Probitiy Audit Tahap Perencanaan dan Persiapan Pemilihan Pengadaan Pembangunan War Room dan Otomatisasi Proses Bisnis Digital KKP TA 2023 pada	4

NO	Unit Kerja	Laporan Hasil Audit	Jumlah Rekomendasi
		Pusdatin Setjen KKP	
7	Biro Umum dan PBJ	Hasil Probitas Audit Tahap Perencanaan dan Persiapan PBJ Tahun 2023 pada BUPBJ	6
8	Biro Umum dan PBJ	SHR PAPBJ Setjen TW II Tahun 2023	3
9	Biro SDMAO	LHA Kinerja TA 2022-2023 pada Biro SDMAO	16
10	Biro Keuangan	LHA Kinerja pada Biro Keuangan TA 2022 - 2023	8
11	Biro Hukum	LHA Kinerja TA 2022-2023 pada Biro Hukum	15
12	Biro Perencanaan	SHR Pembayaran Termin 4, 5 dan 6 Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Hibah Pemerintah Jepang pada Biro Perencanaan	1
13	LPMUKP	SHR LK LPMUKP (BA BUN 999.03) Semester I Tahun 2023	5
14	Biro Perencanaan	SHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal KKP	4
15	LPMUKP	Audit Kinerja TA 2022-2023 pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP)	18
16	Biro Perencanaan	Hasil Reviu RKA-K/L (pagu indikatif) TA 2024 pada Sekretariat Jenderal KKP	5
17	Biro Umum dan PBJ	Hasil Reviu Rencana Kebutuhan BMN TA 2025 Lingkup Sekretariat Jenderal KKP	1
	LPMUKP		1
18	Biro SDMAO	Hasil Evaluasi Kepegawaian TA 2022 dan 2023 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	2
	Biro Hukum		1
19	BHKLN	Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik	1

NO	Unit Kerja	Laporan Hasil Audit	Jumlah Rekomendasi
	Biro Umum dan PBJ	Negara (BMN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2022-2023 pada Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal	2
20	Pusdatin	Hasil Evaluasi Sistem Informasi Sumber Daya KP Terintegrasi yang Operasional TA 2022-2023 pada Pusdatin	3
21	Biro SDMAO	Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Sekretariat Jenderal	6
22	Biro Umum dan PBJ	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal	2
Total Rekomendasi			113

Tabel 36 Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2017 - 2023

SK 1		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga									
IK 10		: Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal									
Realisasi 2017– 2022							Realisasi TW IV Tahun 2023		Renstra Tahun 2020 – 2024		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	97.86	75	99,12	132.16	80	125	

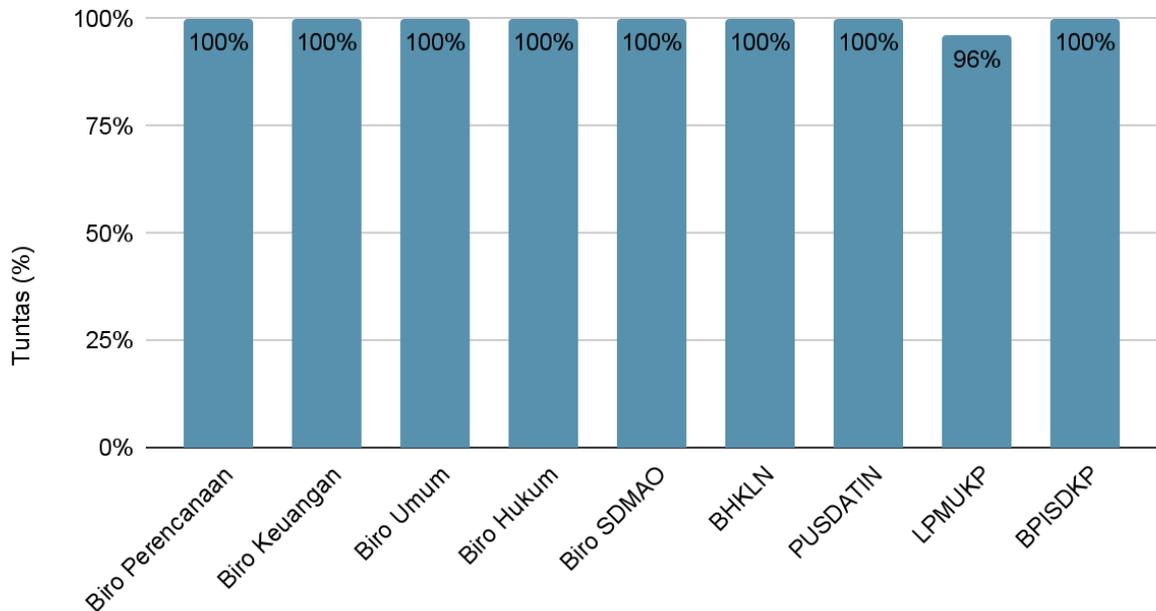
Unit Kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal yang memiliki temuan atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal adalah Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Umum dan PBJ, Biro Hukum, Biro SDMAO, Biro Humas dan KLN, Pusdatin, dan LPMUKP. Sampai dengan berakhirnya periode penilaian capaian IKU Triwulan IV TA 2023 yaitu pada tanggal 30 Desember 2023 Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Umum dan PBJ, Biro Hukum, Biro SDMAO, Biro Humas dan KLN, dan Pusdatin telah menyelesaikan secara tuntas semua rekomendasi pada seluruh LHA Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan penyelesaian rekomendasi-rekomendasi tersebut maka capaian IKU dari masing-masing Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 37 Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	10	10	100,0 0	0	00,00
2	Biro Keuangan	12	12	100,0 0	0	00,00
3	Biro Umum	18	18	100,0 0	0	00,00
4	Biro Hukum	16	16	100,0 0	0	00,00
5	Biro SDMAO	24	24	100,0 0	0	00,00
6	Biro Humas dan KLN	1	1	100,0 0	0	00,00
7	PUSDATIN	7	7	100,0 0	0	00,00
8	LPMUKP	25	24	96,00	1	04,00
9	BPISDKP	0	0	100,0 0	0	00,00
TOTAL		113	112	99,12	1	00,88

Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan



Kegiatan penyelesaian tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal selama periode TW IV TA 2023 adalah:

1. Melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal.

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 di ruang rapat Ruang Rapat Biro Keuangan, Gedung Mina Bahari IV Lantai 3B. Rapat dibuka dan dipimpin Kepala Biro Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim kerja tindak lanjut serta dihadiri oleh peserta perwakilan dari Inspektorat I dan Pejabat/Pegawai yang menangani tindak lanjut pada Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal beserta tim yang menangani bidang/permasalahan yang menjadi temuan.

Rapat dilaksanakan dengan mengidentifikasi permasalahan dalam penyelesaian tindak lanjut untuk kemudian disusun strategi terbaik dalam mengatasi hal tersebut. Para peserta rapat beserta Inspektorat I menyepakati strategi penyelesaian dan batas waktu penginputan kedalam aplikasi SIDAK.



Gambar 11 Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal

2. Melaksanakan Rapat Pembahasan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Unit Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal.

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2023 di ruang rapat Ruang Rapat Biro Keuangan, Gedung Mina Bahari IV Lantai 3B. Rapat dibuka dan dipimpin Kepala Biro Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim kerja tindak lanjut serta dihadiri oleh peserta perwakilan dari Inspektorat I dan Pejabat/Pegawai yang menangani tindak lanjut pada Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal beserta tim yang menangani bidang/permasalahan yang menjadi temuan.

Rapat dilaksanakan dengan monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan Inspektorat Jenderal pada Unit Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati pada Rapat Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal pada tanggal 27 November 2023. Terhadap rencana aksi yang belum dilakukan penyelesaian, Biro Keuangan dan tim yang menangani bidang/permasalahan yang menjadi temuan melakukan fokus percepatan pada temuan terkait sebelum dilakukan Gelar Pengawasan IKU Triwulan IV pada tanggal 29 Desember 2023.



Gambar 12 Dokumentasi Rapat Pembahasan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Unit Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal

Dengan dilaksanakannya percepatan penyelesaian rencana aksi yang disepakati dalam rapat, temuan di lingkup Sekretariat Jenderal dapat diselesaikan dengan capaian 99.12%.

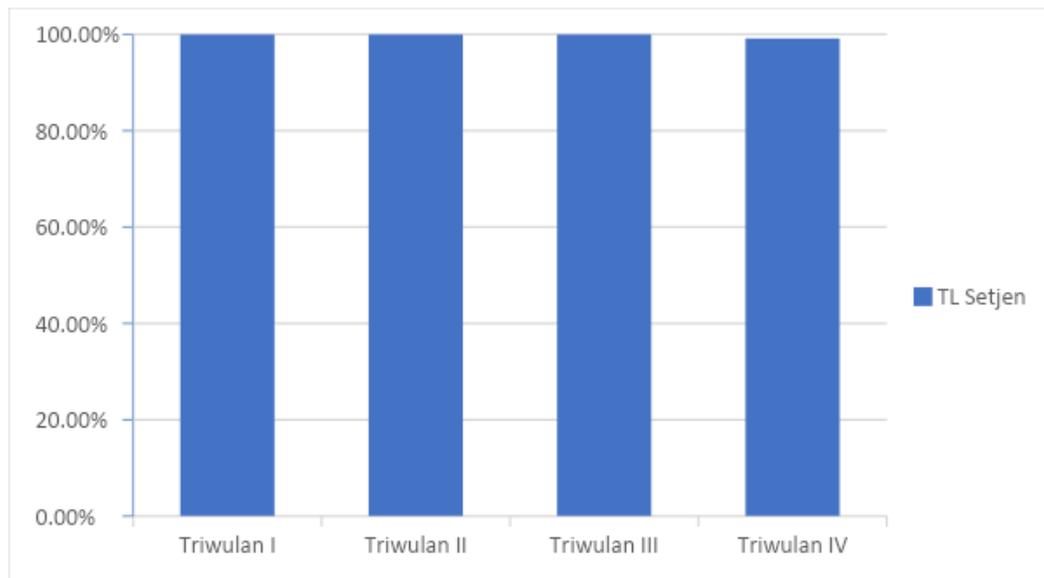
Perbandingan perkembangan capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal

Membandingkan hasil capaian IKU Triwulan I TA 2023, Triwulan II TA 2023, dengan Triwulan III TA.2023 diketahui bahwa Setjen dapat mempertahankan capaian IKU sebesar 100%. Pada Triwulan III TA 2023, IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal berhasil dicapai sebesar 100%.

Capaian IKU 100% ini tidak lepas dari perhatian penuh Pimpinan di Unit Kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal sehingga dapat

menyelesaikan temuan secara tuntas. rekomendasi secara tuntas dalam periode penilaian.

Progres penyelesaian Capaian IKU yang dilaksanakan per triwulan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:



Gambar 13 Progres Perbandingan Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja”

Capaian IKU Triwulan I TA 2023: 100,00%

Capaian IKU Triwulan II TA 2023: 100,00%

Capaian IKU Triwulan III TA 2023: 100,00%

Capaian IKU Triwulan IV TA 2023: 99,12%

Kendala/Permasalahan dalam pencapaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal.

Tidak ada kendala/permasalahan yang berarti dalam penyelesaian tindak lanjut capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2023 ini sehingga secara keseluruhan memenuhi target. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja keras Pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal baik dalam melakukan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi temuan berulang maupun dalam melakukan penyelesaian temuan dengan menindaklanjuti segera mungkin sesuai rekomendasi.

Strategi dalam Pencapaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal

Strategi dalam pencapaian target IKU di Triwulan ini adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan rapat bulanan secara rutin untuk memantau penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
2. mengundang Inspektorat Mitra jika terbit LHA baru untuk mengklarifikasi temuan dan tindak lanjut apa yang paling tepat untuk menyelesaikan rekomendasinya serta menyusun *timeline* penyelesaian rekomendasi;
3. melaksanakan langkah-langkah aksi penyelesaian rekomendasi sesuai dengan *timeline* yang disepakati;
4. Tim tindak lanjut bekerjasama dengan Tim Inspektorat I sebagai mitra Sekretariat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terkait kendala dan kesulitan yang dihadapi mitra dalam melakukan tindak lanjut serta membahas solusi bersama apabila terdapat LHA yang tidak dapat ditindak lanjuti.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perbaikan pencapaian pencapaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal.

Dalam hal evaluasi pelaksanaan pencapaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023, kiranya perlu memperhatikan beberapa langkah perbaikan serta strategi penyelesaian rekomendasi tersebut, diantaranya:

1. Mempelajari temuan-temuan yang ada pada LHP yang terbit dan membahas bersama dengan seluruh Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal agar saling memahami permasalahan yang menimbulkan temuan untuk mencegah munculnya kondisi yang sama agar tidak terjadi temuan berulang.
2. Membahas bersama konsep temuan yang disampaikan oleh Tim Pengawasan Inspektorat Jenderal dengan seluruh Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal, walaupun pengawasan hanya pada satu Unit Eselon II Sekretariat Jenderal, agar rekomendasi dapat diselesaikan bersama dan menjadi pembelajaran Unit Kerja lainnya agar tidak terjadi temuan berulang, terutama jika obyek pengawasan menyangkut Unit Eselon II ataupun rekomendasi yang muncul membutuhkan tindak lanjut dari Unit Eselon II lainnya.

3.2.11. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Nilai Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tidak kalah penting dengan kedua sumber pendapatan lainnya yaitu pajak dan hibah. Pada APBN tahun 2023, PNBK Kementerian Kelautan dan Perikanan diproyeksikan sebesar Rp4,08 triliun. Untuk mencapai angka tersebut, perlu dilakukan pengelolaan PNBK yang optimal dan sistematis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dinyatakan bahwa pengelolaan PNBK meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan PNBK yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan pimpinan instansi pengelola PNBK, memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan Negara yang berasal dari PNBK.

Pengelolaan PNBK adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBK. PNBK sektor kelautan dan perikanan berasal dari penerimaan PNBK SDA perikanan, PNBK lainnya berupa penerimaan yang diperoleh Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya serta pendapatan badan layanan umum.

Dalam pengelolaan PNBK, perencanaan disusun dalam bentuk rencana PNBK. Rencana PNBK merupakan hasil perhitungan dan penetapan target PNBK atau target dan pagu penggunaan dana PNBK yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan rencana PNBK dilakukan oleh instansi pengelola PNBK, sedangkan penelaahan dan penetapan atas rencana PNBK oleh Menteri Keuangan. Pimpinan instansi pengelola PNBK/Menteri Kelautan dan Perikanan menyusun rencana PNBK untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju rencana PNBK untuk tiga tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.

Pimpinan instansi pengelola PNBП/Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan rencana PNBП kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Januari. Menteri Keuangan menetapkan rencana PNBП tersebut pada bulan Februari berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan. Rencana PNBП digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN antara pemerintah dan DPR, dan apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat harus dilakukannya penyesuaian atas rencana PNBП, maka pimpinan instansi pengelola PNBП wajib menyampaikan penyesuaian rencana PNBП tersebut kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Juni agar dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyusun RUU APBN pada bulan Juli. Rencana PNBП yang telah ditetapkan dalam APBN dilakukan pemutakhiran oleh pimpinan instansi PNBП, yang disampaikan pada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah APBN ditetapkan. Hasil pemutakhiran digunakan sebagai bahan penyusunan rincian pendapatan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Setelah dilakukan perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah penentuan PNBП terutang. PNBП terutang merupakan kewajiban PNBП dari wajib bayar kepada pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu. PNBП terutang dihitung oleh instansi pengelola PNBП/Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengelola PNBП wajib melakukan pemungutan PNBП berdasarkan jenis dan tarif PNBП. Wajib bayar harus membayar PNBП terutang paling lambat pada saat jatuh tempo dan apabila tidak dilakukan, maka wajib bayar akan dikenai sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBП terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Sanksi tersebut dikenakan untuk waktu paling lama 24 bulan. Adapun PNBП yang telah dibayarkan oleh wajib bayar tersebut harus disetor ke kas negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib melakukan monitoring dan verifikasi terhadap pembayaran dan penyetoran PNBП tersebut.

Penggunaan dana PNBP harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, Menteri Keuangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan penggunaan dana PNBP dari instansi pengelola PNBP dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBP. Persetujuan penggunaan dana PNBP menjadi dasar instansi pengelola PNBP untuk mengusulkan pagu penggunaan PNBP dalam rangka penyusunan rencana PNBP.

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan PNBP telah dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya pertanggungjawaban PNBP. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, pimpinan instansi pengelola PNBP/Menteri Kelautan dan Perikanan wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan yang disusun secara periodik setiap semester. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lama satu bulan setelah periode laporan berakhir.

Penilaian kinerja pengelolaan PNBP sektor kelautan dan perikanan tahun 2023 terdiri dari:

1. Penyusunan usulan dan penetapan rencana PNBP
2. Regulasi/ketentuan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan PNBP
3. Monitoring pelaksanaan PNBP dilakukan secara bulanan
4. Penyusunan laporan pelaksanaan PNBP dan disampaikan ke Menteri Keuangan secara semester
5. Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP ke Menteri Keuangan

Tabel 38 Capaian kinerja TA 2023

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Penyusunan usulan dan penetapan rencana PNBP	30	30
2	Regulasi/ketentuan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan PNBP	10	10
3	Monitoring pelaksanaan PNBP dilakukan secara bulanan	30	30
4	Penyusunan laporan pelaksanaan PNBP dan disampaikan ke Menteri Keuangan secara semester	20	20

No	Uraian	Target	Realisasi
5	Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP oleh Menteri Keuangan	10	10
TOTAL		100	100

Capaian kinerja TA 2023 sebesar 100 atas target sebesar 100 , berikut penjelasan detail setiap penilaian:

Penyusunan usulan dan penetapan rencana PNBP

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan usulan rencana PNBP pagu indikatif TA 2024 pada Kementerian Keuangan berupa proposal usulan target dan pagu penggunaan PNBP KKP TA 2024 pada tanggal 25 Januari 2023 melalui surat Kepala Biro Keuangan atas nama Sekretaris Jenderal nomor B.317/SJ.2/KU.340/I/2023.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan target PNBP KKP TA 2024 sebesar Rp2.465.133.368.000,- dengan rincian usulan target PNBP SDA sebesar Rp1.500.426.800.000,-, usulan target PNBP lainnya sebesar Rp905.510.400.000,- dan usulan target PNBP BLU sebesar Rp59.510.400.000,- dan usulan pagu penggunaan PNBP TA 2024 sebesar Rp452.337.834.000,- dengan rincian usulan pagu penggunaan PNBP SDA sebesar Rp186.052.901.000,-, usulan pagu penggunaan PNBP lainnya sebesar Rp206.774.533.000,- dan usulan pagu penggunaan PNBP BLU sebesar Rp59.510.400.000,-.

Kementerian Keuangan melakukan penelaahan dan pembahasan usulan target dan pagu penggunaan PNPB KKP TA 2024 pada tanggal 3 Februari 2022, dengan hasil pembahasan berupa penetapan target PNPB KKP TA 2024 sebesar Rp2.466.416.555.000,- dan pagu penggunaan PNPB KKP TA 2023 sebesar Rp453.251.687.000,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel 39 Target dan Pagu PNPB per unit Eselon I (dalam rupiah)

No.	UNIT ESELON I	Usulan 2024		Hasil Pembahasan		Selisih	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	032.01 SETJEN KKP	43.011.358.000	41.739.094.000	43.011.358.000	41.739.094.000	-	-
	424 PEND. BLU	41.739.094.000	41.739.094.000	41.739.094.000	41.739.094.000	-	-
	425 PEND. PNPB LAINNYA	1.272.264.000	-	1.272.264.000	-	-	-
2	032.03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP	1.561.183.786.000	228.990.716.000	1.562.466.973.000	229.952.963.000	1.283.187.000	962.247.000
	421 PEND. PNPB SDA	1.500.426.800.000	186.052.901.000	1.500.426.800.000	186.052.901.000	-	-
	425 PEND. PNPB LAINNYA	60.756.986.000	42.937.815.000	62.040.173.000	43.900.062.000	1.283.187.000	962.247.000
3	032.04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	49.985.496.000	38.786.506.000	49.985.496.000	38.786.506.000	-	-
4	032.05 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KP	6.999.264.000		6.999.264.000	-	-	-
5	032.06 DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KP	7.625.123.000	6.642.561.000	7.625.123.000	6.642.561.000	-	-
6	032.07 DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	708.313.391.000	70.831.306.000	708.313.391.000	70.831.306.000	-	-
7	032.12 BDN RISET DAN SDM KP	32.134.003.000	27.843.347.000	32.134.003.000	27.843.347.000	-	-
	424 PEND. BLU	17.771.306.000	17.771.306.000	17.771.306.000	17.771.306.000	-	-
	425 PEND. PNPB LAINNYA	14.362.697.000	10.072.041.000	14.362.697.000	10.072.041.000	-	-
8	032.13 BDN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KHP	55.880.947.000	38.455.910.000	55.880.947.000	38.455.910.000	-	-
	TOTAL PNPB KKP	2.465.133.368.000	452.289.440.000	2.466.416.555.000	453.251.687.000	1.283.187.000	962.247.000

Rencana PNBP KKP TA 2024 dibandingkan TA 2023 menurun sangat signifikan hingga 39,56%. Rencana PNBP KKP TA 2023 terdiri dari target PNBP sebesar Rp4.078.915.975.000,- dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp233.022.677.000,-. Upaya pencapaian rencana PNBP KKP TA 2024 dilakukan dengan cara:

1. Perubahan kebijakan dan regulasi PNBP
2. Peningkatan pelayanan
3. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana
4. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha
5. Peningkatan koordinasi antar Instansi
6. Peningkatan pengawasan

Tabel 40 Target dan Pagu PNBP per Akun Penerimaan (dalam rupiah)

No.	JENIS PNBP	Usulan 2024		Hasil Pembahasan		Selisih	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	421 PEND. PNBP SDA	1.500.426.800.000	186.052.901.000	1.500.426.800.000	186.052.901.000	-	-
	a. PPP	267.452.407.000	9.574.020.000	267.452.407.000	9.574.020.000	-	-
	b. PHP	1.232.974.393.000	698.400.000.000	1.232.974.393.000	698.400.000.000	-	-
2	425 PEND. PNBP LAINNYA	905.196.168.000	206.728.139.000	906.479.355.000	207.688.386.000	1.283.187.000	962.247.000
3	424 PEND. BLU	59.510.400.000	59.510.400.000	59.510.400.000	59.510.400.000	-	-
	TOTAL PNBP KKP	2.465.133.368.000	452.289.440.000	2.466.416.565.000	453.251.687.000	1.283.187.000	962.247.000

Biro Keuangan mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* Proses Penyusunan Usulan Target dan Pagu Penggunaan PNBP di K/L dan Mekanisme/Tata Cara Perubahan Target dan Pagu Penggunaan PNBP di K/L pada Tahun Berjalan dalam rangka tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Kinerja pada Biro Keuangan TA 2022 – 2023 pada tanggal 4 September 2023 baik secara daring dan luring di Ruang Rapat Biro Keuangan KKP. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat PNBP SDA dan KND Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan dihadiri perwakilan seluruh Unit Eselon I di lingkungan KKP sebagai pengelola PNBP KKP. Hal – hal yang disampaikan dan perlu mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut sebagaimana disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Keuangan yaitu:

1. Pengelolaan PNBP yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

2. Prinsip perencanaan PNBPN yaitu realistis, optimal, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Dasar penyusunan rencana PNBPN yaitu jenis dan tarif atas jenis PNBPN, perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBPN, asumsi dasar ekonomi makro, piutang PNBPN yang diperkirakan, dan hasil pengawasan PNBPN.
4. Siklus perencanaan PNBPN mengikuti siklus penyusunan APBN.
5. Target dan realisasi PNBPN KKP tahun 2019 – 2023 dan target RAPBN 2024.
6. Perubahan target PNBPN tahun berjalan (PMK 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan), target PNBPN pada tahun berjalan merupakan angka yang sudah ditetapkan dalam UU APBN dan Perpres rincian APBN, perubahan target PNBPN hanya dapat dilakukan ketika terdapat APBN-P pada tahun berjalan.
7. Perubahan anggaran belanja yang bersifat menambah pagu anggaran dilakukan dalam hal:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN baru;
 - b. adanya Satker PNBPN baru;
 - c. adanya persetujuan penggunaan PNBPN baru atau peningkatan persetujuan penggunaan PNBPN oleh Menteri Keuangan;
 - d. adanya perkiraan kenaikan PNBPN berdasarkan surat pernyataan KPA untuk menambah volume RO;
 - e. adanya peningkatan target PNBPN (yang dapat digunakan) dalam perubahan APBN, termasuk perubahan postur APBN, dari target PNBPN yang ditetapkan dalam APBN;
 - f. penggunaan penerimaan klaim asuransi barang milik negara dalam rangka pengadaan barang milik negara yang dipertanggungjawabkan;
 - g. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari perhitungan PNBPN tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan khusus untuk Otorita Ibu Kota Nusantara;

- h. penggunaan kelebihan realisasi penerimaan atas target PNBPN;
 - i. revisi pagu anggaran untuk Kementerian/Lembaga atau Satker yang belum memiliki target PNBPN dalam DIPA di awal tahun anggaran berkenaan;
 - j. Revisi Anggaran yang bersumber dari PNBPN BLU, termasuk penetapan status BLU suatu Satker dan/ atau penggunaan saldo kas untuk BLU bersangkutan maupun untuk BLU lainnya; dan/atau
 - k. pagu penggunaan dana PNBPN belum dialokasikan sampai dengan batas tertinggi persetujuan penggunaan dana PNBPN
8. Revisi anggaran pada K/L atau BUN berupa perubahan target PNBPN yang disebabkan adanya perubahan postur APBN tanpa mengubah pagu belanja.
9. Besaran tambahan pagu yang berasal dari perkiraan kenaikan PNBPN atau kelebihan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf d dan huruf h dihitung:
- a. paling tinggi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tambahan perkiraan kenaikan PNBPN atau kelebihan realisasi PNBPN; atau
 - b. lebih dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tambahan perkiraan kenaikan PNBPN atau kelebihan realisasi PNBPN dalam APBN, setelah berkonsultasi dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Hal – hal yang perlu diperhatikan:
- a. Batas Waktu Penyampaian Rencana PNBPN
Semula: paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan
Menjadi: paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan
 - b. Besaran tambahan pagu yang berasal dari perkiraan kenaikan PNBPN atau kelebihan realisasi penerimaan

Paling tinggi sebesar 7,5% dari tambahan perkiraan kenaikan PNBPN atau kelebihan realisasi PNBPN. Lebih dari 7,5% setelah berkoordinasi dengan Banggar.

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan meliputi satu tahun, dimana rangkaian pengelolaan APBN selanjutnya disebut sebagai siklus APBN. Dalam siklus APBN setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN dan lampiran kepada DPR, DPR melakukan pembahasan dan penetapan RUU APBN dengan Pemerintah.

Rencana PNBPN KKP dilakukan pembahasan dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Pembahasan RAPBN TA 2024 dengan Badan Anggaran DPR RI pada tanggal 5 September 2023, dengan hasil sebagai berikut:

1. PNBPN SDA Perikanan berubah nomenklatur menjadi **Pengelolaan Usaha Kelautan/Perikanan** dan disepakati sebesar Rp3.500,00 miliar.
2. Upaya pencapaian target PNBPN tersebut antara lain:
 - a. Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka mengoptimalkan pelestarian ekologi dan keberlanjutan sumber daya;
 - b. Penyederhanaan proses bisnis dan kemudahan perizinan usaha penangkapan ikan; dan
 - c. Digitalisasi dan integrasi data sektor perikanan antar K/L dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan rincian target sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI melalui surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor B.1019/SJ/KU.340/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 hal Usulan Perubahan Akun Pendapatan SDA Perikanan Menjadi Pendapatan SDA Pengelolaan Usaha Kelautan/Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

1. PNBP SDA Perikanan sebesar Rp1.791.500.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Akun 421521, Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Bidang Perikanan Tangkap sebesar Rp25.725.748.000,-
 - b. Akun 421522, Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Bidang Pembudidayaan Ikan sebesar Rp52.905.000,-.
 - c. Akun 421531, Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebesar Rp1.765.721.347.000,-
2. PNBP SDA Pengelolaan Usaha Kelautan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Sedimentasi sebesar Rp1.708.500.000.000,-

Tabel 41 Target dan Pagu PNBP per unit Eselon I hasil Banggar DPR RI

No	Unit Eselon I	Kesepakatan Banggar	
		Target	Pagu
1	032.01 SETJEN KKP	43.011.358.000	41.739.094.000
	424 Pend. BLU	41.739.094.000	41.739.094.000
	425 Pend. PNBP Lainnya	1.272.264.000	0
2	032.03 DITJEN PT	1.852.256.986.000	229.952.963.000
	421 Pend. PNBP SDA	1.791.500.000.000	186.052.901.000
	425 Pend. PNBP Lainnya	60.756.986.000	43.900.062.000
3	032.04 DITJEN PB	49.985.496.000	46.621.070.000
	424 Pend. BLU	35.410.864.000	35.410.864.000
	425 Pend. PNBP Lainnya	14.574.632.000	11.210.206.000
4	032.05 DITJEN PENGAWASAN SDKP	6.999.264.000	-
5	032.06 DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KP	7.625.123.000	5.642.561.000
6	032.07 DITJEN PRL	2.416.813.391.000	70.831.306.000
	424 Pend. PNBP SDA	1.708.500.000.000	0
	425 Pend. PNBP Lainnya	708.313.391.000	70.831.306.000
7	032.12 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	32.134.003.000	32.134.003.000
	424 Pend. BLU	17.771.306.000	17.771.306.000
	425 Pend. PNBP Lainnya	14.362.697.000	10.072.041.000
8	032.13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HKP	55.880.947.000	38.455.910.000
TOTAL PNBP KKP		3.832.642.433.000	4.464.706.568.000

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 (Pagu Indikatif) yang diselenggarakan pada tanggal 9 s.d 10 November 2023 di Ruang Meeting Avenzal Hotel and Convention, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 60 peserta yang merupakan pengelola PNBP dari Satker Pusat dan Satker UPT wilayah Indonesia Bagian Barat pada Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 141 peserta daring yang merupakan pengelola PNBPN dari seluruh Satker UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Regulasi/ketentuan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan PNBPN

PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamanatkan beberapa aturan pelaksanaan diantaranya yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan yaitu:

Tabel 42 Matriks Aturan Pelaksanaan PNBPN yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan

No	Amanat Pasal PP No 85/2021	Uraian	Peraturan Menteri KP
1	Pasal 14	Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PermenKP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP Di Luar Pemanfaatan SDA; 2. PermenKP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP Di Luar Pemanfaatan SDA. 3. PermenKP Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar

No	Amanat Pasal PP No 85/2021	Uraian	Peraturan Menteri KP
			Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
2	Pasal 17 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	PermenKP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas PNBP yang Berlaku pada KKP

Dalam rangka optimalisasi PNBP berupa pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya dan mengikuti permintaan terkait beberapa jenis ikan yang belum ditetapkan harga patokannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan revisi Peraturan Menteri KP Nomor 85 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2022.

Tabel 43 Matriks Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan PNBP KKP dan Perubahannya

No	PP/PermenKP/KepmenKP	Tentang	Status
1	PP Nomor 85 Tahun 2021	Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP	Masih berlaku, mencabut PP Nomor 75 Tahun 2015
2	PermenKP Nomor 14/PERMEN-KP/2016	Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan	Masih berlaku
3	KepmenKP Nomor 24/KEPMEN-KP/2020	Besaran Faktor S Dalam Penghitungan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP	Masih berlaku
4	PermenKP Nomor 27 Tahun 2021	Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI yang Bukan Tujuan Komersial	Masih berlaku
5	PermenKP Nomor 28 Tahun 2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Masih berlaku
6	PermenKP Nomor 31 Tahun 2021	Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan	Masih berlaku
7	PermenKP Nomor 34 Tahun 2021	Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan	Dicabut dengan

No	PP/PermenKP/KepmenKP	Tentang	Status
			PermenKP Nomor 1 Tahun 2023
8	PermenKP Nomor 35 Tahun 2021	Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas PNBPN yang Berlaku pada KKP	Masih berlaku
9	PermenKP Nomor 38 Tahun 2021	Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP yang Berasal dari Pemanfaatan SDA Perikanan	Dicabut dengan PermenKP Nomor 2 Tahun 2023
10	PermenKP Nomor 39 Tahun 2021	Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP di Luar Pemanfaatan SDA Perikanan	Diubah dengan PermenKP Nomor 24 Tahun 2022
11	KepmenKP Nomor 81 Tahun 2021	Besaran Nilai faktor E Dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBPN	Masih berlaku
12	KepmenKP Nomor 82 Tahun 2021	Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBPN	Masih berlaku
13	KepmenKP Nomor 83 Tahun 2021	Harga Patokan Pengembangan Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi Dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBPN	Masih berlaku
14	KepmenKP Nomor 84 Tahun 2021	Harga Patokan Nilai Konservasi Pemanfaatan/Peminjaman Jenis Ikan Dilindungi dari Habitat Alam Dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBPN	Masih berlaku
15	KepmenKP Nomor 85 Tahun 2021	Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBPN	Diubah dengan KepmenKP Nomor 13 Tahun 2022
16	KepmenKP Nomor 86 Tahun 2021	Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan	Masih berlaku
17	KepmenKP Nomor 87 Tahun 2021	Produktivitas Kapal Penangkap Ikan	Masih berlaku

No	PP/PermenKP/KepmenKP	Tentang	Status
18	KepmenKP Nomor 88 Tahun 2021	Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Denda Administratif Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di Wilayah Negara RI	Masih berlaku
19	PermenKP Nomor 1 Tahun 2023	Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan	Masih berlaku
20	PermenKP Nomor 2 Tahun 2023	Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan	Masih berlaku
21	Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021	Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga	Masih berlaku
22	Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.02/2022	Persetujuan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	Masih berlaku
23	Surat Menteri Keuangan Nomor S-787/MK.02/2022	Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan	Masih berlaku

Seiring dengan perkembangan implementasi PP Nomor 85 Tahun 2021, KKP memiliki program utama kelautan dan perikanan untuk ekonomi biru, kebijakan reformasi tata kelola perikanan nasional yang diimplementasikan melalui kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan dan penetapan zona penangkapan sehingga diperlukan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KKP melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan Nomor B.166/MEN-KP/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 hal Usulan Perubahan PP Nomor 85 Tahun 2021.

Tabel 44 Perkembangan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KKP

No	Uraian Kegiatan	Dokumen Sumber	Tanggal Pelaksanaan
1	Pembahasan Usulan Perubahan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	Undangan Direktur PNBP, SDA, dan KND DJA Kementerian Keuangan Nomor UND-32/AG/AG.6/2023 tanggal 13 Februari 2023	14 Februari 2023
2	Tindak Lanjut Usulan Perubahan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	Surat Direktur PNBP, SDA, dan KND a.n Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-33/AG/AG.6/2023 tanggal 23 Februari 2023	24 Februari 2023
3	Penyelesaian Revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 khususnya melengkapi data dukung analisis dan kajian urgensi sesuai permintaan Kementerian Keuangan Nomor S-33/AG/AG.6/2023 tanggal 23 Februari 2023	Undangan Kepala Biro Keuangan Nomor a.n Sekretaris Jenderal Nomor B.703/SJ.2/TU.330/II/2023 tanggal 3 Maret 2023	6 Maret 2023
4	<i>Focus Group Discussion</i> Optimalisasi PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Usulan Perubahan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	Undangan Kepala Biro Keuangan Nomor a.n. Sekretaris Jenderal Nomor B.865/SJ.2/TU.330/III/2023 tanggal 24 Maret 2023	29 s.d 31 Maret 2023
5	Penyampaian Data Dukung Perubahan PP Nomor 85 Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan	Surat Kepala Biro Keuangan atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.1189/SJ.2/KU.340/V/2023 tanggal 3 Mei 2023	3 Mei 2023
6	Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang tentang	Surat Menteri Keuangan kepada Presiden RI Nomor S-	27 Juni 2023

No	Uraian Kegiatan	Dokumen Sumber	Tanggal Pelaksanaan
	Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Presiden RI	523/MK.02/2023 tanggal 27 Juni 2023	
7	Pembahasan Permohonan Izin Prakarsa RPP	Undangan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-226/KSN/D-1/HK.02.02/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023	24 Agustus 2023
8	Pembahasan Tindak Lanjut Surat Menteri Sekretaris Negara Penyampaian Hasil Pembahasan atas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	undangan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan nomor UND-202/AG/AG.6/ 2023 tanggal 31 Oktober 2023	1 November 2023
9	Penyampaian Data Dukung Perubahan PP Nomor 85 Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan	Surat Kepala Biro Keuangan atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.2970/SJ.2/TU.330/XI/2023	3 November 2023

Dalam rangka tindak lanjut usulan perubahan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Keuangan menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* Optimalisasi PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Usulan Perubahan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Avenzel Hotel and Convention Cibubur pada tanggal 29 s.d 31 Maret 2023.

Monitoring pelaksanaan PNBP dilakukan secara bulanan

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP dinyatakan bahwa instansi pengelola PNBP sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan monitoring secara periodik atas pelaksanaan PNBP tahun anggaran berjalan. Monitoring PNBP terdiri atas:

Monitoring realisasi atas target PNBP yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2023 dengan detail sebagai berikut:

Tabel 45 Monitoring realisasi atas target PNBP yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2023 (dalam Rp)

No	Unit Eselon I	Target PNBP 2023 (Target Semula)	Target PNBP 2023 (Target Menjadi)	Realisasi s.d. 31 Desember 2023	%
1	DJPT	3.564.526.679.000	3.573.988.325.000	736.108.210.555	20,65
	a. SDA	3.500.000.000.000	3.500.000.000.000	636.893.353.269	18,20
	b. PNBP Lainnya	64.526.679.000	73.988.325.000	99.214.857.286	153,76
2	DJPB	22.589.806.000	22.589.806.000	43.258.107.475	191,49
	a. PNBP Lainnya	13.848.509.000	13.848.509.000	29.629.013.046	213,95
	b. BLU- Jepara	4.240.598.000	4.240.598.000	1.639.471.822	38,66
	c. BLU-Situbondo	3.375.974.000	3.375.974.000	3.850.475.751	114,06
	d. BLU-Karawang	1.124.725.000	1.124.725.000	8.139.146.856	723,66
3	DJPSPDKP	9.336.299.000	5.836.299.000	30.613.322.664	327,90
4	DJPSPKP	8.647.599.000	8.647.599.000	15.226.344.631	176,08
5	DJPKRL	333.169.648.000	333.169.648.000	707.036.792.705	212,22
6	BPPSDMKP	24.731.913.000	24.731.913.000	32.056.666.124	129,62
	a. PNBP Lainnya	13.199.904.000	13.199.904.000	18.191.719.739	137,82
	b. BLU- Tegal	7.191.508.000	7.191.508.000	9.075.535.075	126,20
	c. BLU- Sidoarjo	4.340.501.000	4.340.501.000	4.789.411.310	110,34
7	BPPMHKP	54.908.174.000	54.927.999.000	71.800.956.299	130,77
8	ITJEN	-	-	420.555.837	0,00
9	SETJEN	61.005.857.000	61.005.857.000	62.519.537.707	102,48

No	Unit Eselon I	Target PNBPN 2023 (Target Semula)	Target PNBPN 2023 (Target Menjadi)	Realisasi s.d. 31 Desember 2023	%
	a. Biro Umum dan PBJ	61.920.000	61.920.000	1.329.718.915	2147,48
	b. BLU- LPMUKP	60.943.937.000	60.943.937.000	61.121.091.532	100,29
	c. BPISDKP	-	-	68.727.260	0,00
TOTAL		4.078.915.975.000	4.084.897.446.000	1.699.040.493.997	41,65

Uraian	Target PNBPN 2023 (Target Semula)	Target PNBPN 2023 (Target Menjadi)	Realisasi sd 31 Desember 2023	%
Total PNBPN Pemanfaatan SDA	3.500.000.000.000	3.500.000.000.000	636.893.353.269	18,20
Total PNBPN Lainnya (pelayanan, pengelolaan BMN dan hak Negara Lainnya)	497.698.732.000	503.680.203.000	973.532.008.382	195,61
Total BLU	81.217.243.000	81.217.243.000	88.615.132.346	109,11
Total	4.078.915.975.000	4.084.897.446.000	1.699.040.493.997	41,65

Sasaran Strategis 3. Ekonomi Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IKU 7. Nilai PNBPN Sektor KP (Rp Triliun)										
Realisasi								2023		
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	% Capaian	% Penurunan 2022- 2023
553,41	711,88	772,44	792,50	857,30	995,74	1.871,16	1.699,04	4.084,89	41,65%	9,19%

Capaian PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 menurun 9,19% dibanding tahun 2022 pada periode yang sama hal ini disebabkan diantaranya:

- a. Tahun 2023 merupakan tahun transisi, yaitu tahun pertama pelaksanaan penarikan pascaproduksi yang sebelumnya praproduksi. Pada tahun transisi, kapal yang beroperasi di tahun 2023 masih mengantongi izin praproduksi dan sudah membayar PNBP praproduksi di tahun 2022. Kapal yang masih mengantongi izin (SIPI) praproduksi belum dapat ditarik PNBP pascaproduksi sampai dengan izin pascaproduksinya terbit.
- b. Penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi menggunakan metode *self assessment* (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran PNBP-nya). Pada tahun transisi 2023, kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan.
- c. Pada saat penyusunan target 2023, penetapan target diasumsikan dapat dilaksanakannya penarikan PNBP SDA dengan sistem kontrak sebagaimana telah diatur dalam PP No. 85 Tahun 2021. Namun demikian, pada perkembangannya ketentuan sistem kontrak dimaksud berdasarkan hasil rapat harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait tidak dapat diimplementasikan.
- d. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan penarikan PNBP SDA pascaproduksi adalah pelabuhan perikanan UPT daerah. Terkait dengan hal tersebut, terus dilakukan upaya-upaya intensif agar dukungan pelabuhan perikanan UPT daerah ini menjadi optimal baik dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kelengkapan SDM pendataan, dll.

Capaian PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp1.699.040.493.997,- atau sebesar 41,65% atas target PNBP KKP tahun 2023 sebesar Rp4.084.897.446.000,-. Capaian PNBP KKP tahun 2023 terdiri dari PNBP pemanfaatan SDA Perikanan sebesar Rp636.893.353.269,- atau 18,20% atas target PNBP pemanfaatan SDA perikanan sebesar Rp3.500.000.000.000,-, kemudian diikuti dengan PNBP lainnya berupa PNBP pelayanan, PNBP pengelolaan BMN, PNBP hak negara lainnya yang capaiannya telah melebihi target sebesar

Rp973.532.008.382,- atau 195,61% atas target PNBPN lainnya sebesar Rp503.680.203.000,-. PNBPN BLU dengan adanya 6 (enam) satker BLU di KKP yaitu BLU LPMUKP, BLU BBPBAP Jepara, BLU BLUPPB Karawang, BLU BPBAP Situbondo, BLU BP3 Tegal, BLU Poltek Sidoarjo ikut menyumbang pendapatan KKP sebesar Rp88.615.132.346,- atau sebesar 109,11% atas target PNBPN BLU sebesar Rp81.217.243.000,-.

Arah kebijakan pengelolaan PNBPN Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka optimalisasi kontribusi PNBPN sektor kelautan dan perikanan terhadap penerimaan negara secara nasional dengan melakukan langkah strategis antara lain:

1. Penyempurnaan proses bisnis dan regulasi pengelolaan PNBPN terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi pengelolaan PNBPN.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan PNBPN sehingga lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.
3. Peningkatan pembinaan dan koordinasi antar instansi.
4. Optimalisasi fungsi kantor vertikal KKP di daerah/Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penguatan data potensi, perencanaan, kinerja, dan implementasi kebijakan PNBPN.
5. Peningkatan pengawasan dan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka pengawasan kepatuhan perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas pengelolaan PNBPN.
6. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi PNBPN.

Monitoring penggunaan dana PNBP Tahun 2023 (dalam Rp)

Tabel 46 Monitoring penggunaan dana PNBP Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Akun Belanja	PAGU 2023	Realisasi Penggunaan s.d 31 Desember 2023	%	Realisasi Penggunaan s.d 31 Desember 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3)	(6)
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
1	Ditjen Perikanan Tangkap	80.803.407.000	71.268.141.634	88,20%	110.841.057.922
2	Ditjen Perikanan Budidaya	16.234.512.000	14.582.525.445	89,82%	17.439.636.344
3	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	53.307.143.000	48.871.855.503	91,68%	24.952.404.891
4	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	6.226.271.000	6.180.126.438	99,26%	3.103.095.116
5	Badan Penyuluhan Pengembangan SDM KP	6.642.349.000	6.570.928.315	98,92%	3.471.436.483
6	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu HKP	6.642.349.000	39.982.769.958	95,96%	37.815.987.274
	BLU - DJPB	2.038.240.000	2.014.539.329	98,84%	
7	BLU - BPPSDMKP	15.300.950.000	9.490.750.325	62,03%	3.586.517.791
8	BLU - LPMUKP	57.174.996.000	37.316.946.840	65,27%	37.605.979.387
	Jumlah Realisasi Penggunaan PNBP KKP (DJPT, DJPB, DJPRL, DJPDSPKP, BPPSDM dan BPPMHKP)	138.705.631.000	125.833.437.037	90,72%	166.096.681.540
	Jumlah Realisasi Penggunaan BLU KKP(DJPB, BPPSDMKP dan LPMUKP)	74.514.186.000	48.822.236.494	65,52%	37.605.979.387
TOTAL		279.395.580.000	236.278.583.787	84,57%	238.816.115.208

Monitoring pengelolaan piutang PNBP

Informasi terkait data piutang PNBP TA. 2023 melalui aplikasi ssdpnbp.kemenkeu.go.id, disajikan sebagai berikut:

Tabel 47 Monitoring pengelolaan piutang PNBP Tahun 2023

Eselon I	Akun Piutang	Saldo Awal	S1 Penambahan	S1 Lainnya	S2 Penambahan	S2 Lainnya
01 - SEKRETARIAT JENDERAL	115211 - Piutang PNBP	17.261.074.458	6.053.123.413	-	1.840.720.453	25.154.918.324
01 - SEKRETARIAT JENDERAL	115212 - Piutang Lainnya	273.471.985	3.666.645	138.493.667	-	138.644.963
02 - INSPEKTORAT JENDERAL	115212 - Piutang Lainnya	97.803.383	-	97.803.383	-	-

Eselon I	Akun Piutang	Saldo Awal	S1 Penambahan	S1 Lainnya	S2 Penambahan	S2 Lainnya
03 - DITJEN PERIKANAN TANGKAP	115211 - Piutang PNB	30.620.367.829	-	1.689.831.903	-	743.050.922
03 - DITJEN PERIKANAN TANGKAP	115212 - Piutang Lainnya	1.922.099.118	50.543.128	570.234.035	8.947.726	40.632.857
04 - DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	115211 - Piutang PNB	350.000.000	350.000.000	350.000.000	120.000.000	-
04 - DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	115212 - Piutang Lainnya	4.373.134.858	67.986.771	3.849.063.327	348.193.450	390.053.899
05 - DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	115211 - Piutang PNB	268.982.997	-	79.142.997	-	20.000.000
05 - DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	115212 - Piutang Lainnya	275.986.579	2.026.940	276.661.279	174.142	1.526.382
06 - DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	115211 - Piutang PNB	740.348.678	-	740.348.678	-	-
06 - DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	115212 - Piutang Lainnya	712.864.821	-	675.241.821	37.800.000	42.800.000
07 - DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	115211 - Piutang PNB	2.214.607.746	2.380.703.327	4.595.311.073	103.095.598.961	-
07 - DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	115212 - Piutang Lainnya	776.203.246	3.605.501	724.942.099	4.601.845	13.722.493
12 - BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	115211 - Piutang PNB	34.590.153	-	33.700.000	20.950.000	890.153
12 - BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	115212 - Piutang Lainnya	945.951.835	61.053.713	154.439.109	80.419.752	132.269.065
13 - BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN	115212 - Piutang Lainnya	28.344.438	3.240.114	31.584.552	2.809.067	2.777.068

Eselon I	Akun Piutang	Saldo Awal	S1 Penambahan	S1 Lainnya	S2 Penambahan	S2 Lainnya
KEAMANAN HASIL PERIKANAN						
Total		60.895.832.124	8.975.949.552	14.006.797.923	105.560.215.396	26.681.286.126

Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP

Laporan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP Tahun 2023 yang disampaikan unit Eselon I pada Biro Keuangan, pada tabel sebagai berikut:

Tabel 48 Informasi Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP

No	Wajib Bayar	Tahun	Surat Pengajuan	Nilai	Keberatan / keringanan / pengembalian	Putusan
1	PT. Sisfo Indonesia	2023	03/SI/SK/III/2022	268.320.000	Keringanan (Angsuran)	Diterima
2	PT. Tambang Jaya Indah	2022	7652/DJPRL/XII/2022	57.908.000	Pengembalian PNBP	Diterima
3	Sdr. Syahrudin	2023	484/KPA.1-PSDKP/IX/2023	Rp327.953.978	Keringanan (Pembebasan)	Diterima
4	Sdr. Tarmin	2023	484/KPA.1-PSDKP/IX/2023	Rp42.609.438	Keringanan (Pembebasan)	Diterima

Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut/Penyelesaian Hasil Pemeriksaan PNBP Dan Hasil Pemeriksaan BPK serta Hasil Pengawasan PNBP

Monitoring yang dilakukan terhadap temuan pemeriksaan yang terkait PNBP dengan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan instansi pemeriksa/BPK, temuan pemeriksaan PNBP oleh tahun 2022 dalam LKPP dalam proses tindak lanjut diantaranya:

- 1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa Kota Batam Terlambat Membayar Kontribusi Tetap Tahun 2022 Senilai Rp2.060.100.229;
- 2) Pengelolaan Pendapatan Perikanan pada Ditjen Perikanan Tangkap Belum Memadai dan Terdapat Kekurangan Penerimaan Senilai Rp290.803.170,00;
- 3) Pengelolaan PNBP dan Belanja pada Poltek KP Sidoarjo Tidak Sesuai

Ketentuan;

- 4) Penatausahaan PNBPN atas Sewa BMN dan Penggunaan Sarana Prasarana pada Dua Satuan Kerja Tidak Sesuai Ketentuan dan Belum Dibayar Senilai Rp1.130.014.082;
- 5) Penatausahaan PNBPN atas Sewa BMN dan Penggunaan Sarana Prasarana pada Dua Satuan Kerja Tidak Sesuai Ketentuan dan Belum Dibayar Senilai Rp1.130.014.082;
- 6) Persetujuan Pemanfaatan Ruang Laut Minimal pada 2.804 Titik Lokasi Belum Memiliki Persetujuan/Konfirmasi KKPRL dan Terdapat Potensi PNBPN Perizinan Penerbitan PPKPRL Minimal Senilai Rp329.618.479.702;
- 7) Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP Tidak Sesuai Ketentuan.

Penyusunan laporan pelaksanaan PNBPN dan disampaikan ke Menteri Keuangan secara semester.

- 1) Laporan pelaksanaan PNBPN Semester II TA. 2022 disampaikan kepada Menteri Keuangan pada akhir bulan Januari 2023 melalui surat Kepala Biro Keuangan atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.400/SJ.2/KU.340/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.
- 2) Laporan pelaksanaan PNBPN Semester I TA. 2023 disampaikan kepada Menteri Keuangan pada akhir bulan Juli 2023 melalui surat Kepala Biro Keuangan atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.1943/SJ.2/KU.340/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.

Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP oleh Menteri Keuangan

Tabel 49 Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP

No	Unit Eselon I	% Izin Penggunaan		
		2022	2023	2024
1	Ditjen P. Tangkap			
	PNBP SDA	69% dari Bagian Pemerintah Pusat 20%	62% dari Bagian Pemerintah Pusat 20%	62% dari Bagian Pemerintah Pusat 20%
	PNBP Lainnya	70,80%	70,80%	-
2	Ditjen P. Budidaya	78,20%	78,20%	-
3	Ditjen PDSPKP	66%	72%	74%
4	Ditjen PKRL	71%	16%	10%
5	BPPSDMKP	74%	74%	74%
6	BPMHKP	68,90%	68,90%	-

Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor:

- 1) S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 2) S-687/MK.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022 hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3) S-787/MK.02/2022 tanggal 20 September 2022 hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan usulan permohonan penggunaan Sebagian dana PNBP SDA Perikanan untuk digunakan dengan pola lintas Unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap dengan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.652/MEN-KP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Tabel 50 Perkembangan usulan izin penggunaan Sebagian dana PNBP SDA Perikanan Lintas Unit Eselon I

No	Uraian Kegiatan	Dokumen Sumber	Tanggal Pelaksanaan
1	Penyampaian Usulan Permohonan Izin Penggunaan Sebagian Dana PNBP SDA Kementerian Kelautan dan Perikanan	surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan Nomor B.652/MEN-KP/V/2023	23 Mei 2023
2	Permintaan Kelengkapan Dokumen atas Usulan Permohonan Penggunaan Sebagian Dana PNBP SDA Kementerian Kelautan dan Perikanan	Surat Direktur PNBP, SDA, dan KND a.n Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-118/AG/AG.6/2023	8 Juni 2023
3	Penyampaian kelengkapan dokumen usulan penggunaan Sebagian dana PNBP SDA Kementerian Kelautan dan Perikanan	Surat Kepala Biro Keuangan a.n Sekretaris Jenderal kepada Direktur PNBP SDA dan KND Nomor B.2196/SJ.2/KU.340/VIII/2023	22 Agustus 2023
4	Penyampaian Kelengkapan Proposal Usulan Penggunaan Sebagian Dana PNBP SDA Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Surat Kepala Biro Keuangan a.n Sekretaris Jenderal kepada Direktur PNBP SDA dan KND No B.2309/SJ.2/KU.340/IX/2023	31 Agustus 2023
5	Penelaahan Usulan Persetujuan Penggunaan Dana PNBP SDA Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor UND-162/AG/AG.6/2023 tanggal 11 September 2023	14 September 2023

No	Uraian Kegiatan	Dokumen Sumber	Tanggal Pelaksanaan
6	Penyampaian Kelengkapan Data Dukung Usulan Penggunaan PNBP SDA Perikanan Lintas Eselon I sesuai Catatan Hasil Pembahasan DJA	Kepala Biro Keuangan a.n Sekretaris Jenderal kepada Direktur PNBP SDA dan KND Nomor B.2477/SJ.2/KU.340/IX/2023	18 September 2023
7	Penelaahan Usulan Penggunaan Dana PNBP SDA Perikanan	Undangan Direktur PNBP SDA dan KND Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor UND-187/AG/AG.6/2023 tanggal 11 Oktober 2023	12 Oktober 2023
8	Permintaan Kelengkapan Dokumen Usulan Persetujuan Penggunaan Dana PNBP SDA Perikanan	Surat Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor S-291/AG/AG.6/2023	16 November 2023
9	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Usulan Penggunaan PNBP SDA Perikanan Lintas Unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Surat Kepala Biro Keuangan a.n Sekretaris Jenderal Nomor B.3223/SJ.2/KU.340/XI/2023	29 November 2023
10	Pembahasan Tindak Lanjut Surat Menteri Sekretaris Negara Penyampaian Hasil Pembahasan atas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	undangan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan nomor UND-202/AG/AG.6/ 2023 tanggal 31 Oktober 2023	1 November 2023
11	Penyampaian Data Dukung Perubahan PP Nomor 85 Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan	Surat Kepala Biro Keuangan atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.2970/SJ.2/TU.330/XI/2023	3 November 2023

Tabel 51 Perbandingan Capaian Nilai Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan

SK 1	: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja sama Antar Lembaga								
IK 11	: Nilai Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan								
Realisasi 2018– 2022						Realisasi TW IV Tahun 2023		Renstra Tahun 2020 – 2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	75	100	125	100	-

Pada capaian IKU pengelolaan PNBP sektor KP tahun 2023 melampaui target tahun 2023 mencapai 100% dari target 75%. Capaian ini masih mencapai target renstra untuk tahun 2024. Tercapainya nilai pengelolaan PNBP sektor kelautan didukung dari koordinasi antara Unit Eselon I teknis terkait pelaporan PNBP kepada Kementerian Keuangan tercapai dengan maksimal.

Hambatan Pencapaian IKU Nilai Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan

1. Data usulan rencana, realisasi, dan usulan persetujuan penggunaan PNBP yang disampaikan Unit Eselon I terlambat disampaikan ke Biro Keuangan, tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data usulan yang disampaikan tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan beberapa kali penyesuaian data dengan ADK
3. Pembahasan rencana PNBP dan regulasi PNBP tidak dihadiri oleh pejabat atau staf yang berkompeten.
4. Perbedaan data realisasi PNBP Unit Eselon I dengan Biro Keuangan, karena perbedaan waktu penarikan data pada aplikasi OMSPAN.
5. Unit Eselon I tidak menyampaikan secara lengkap data dukung pelaporan pelaksanaan PNBP untuk dilaporkan ke Kementerian Keuangan.
6. Unit Eselon I tidak menyampaikan kajian teknis urgensi usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai dasar pemungutan PNBP.

Rekomendasi:

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan PNBP.
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Unit Eselon I dan Kementerian Keuangan.
3. Melakukan *one on one meeting* dengan Unit Eselon I yang memiliki kendala dalam pelaksanaan PNBP.

Selanjutnya adalah Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

Sasaran Kinerja:
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan

Nilai capaian sasaran kegiatan ini didukung oleh **7 (tujuh)** Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

3.2.12. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (persen).

Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dibidang Pengelolaan Keuangan dan BMN yang direncanakan akan diselesaikan pada Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebanyak 3 peraturan yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan KKP;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Utilisasi Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan KKP;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan KKP.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 29/SJ.4/TU.210/II/2024 Tanggal 2 Januari 2024, untuk Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN telah tercapai sebesar 100%.

Peraturan yang berhasil diselesaikan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 3 peraturan yaitu :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan KKP.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Utilisasi Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan KKP; dan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan KKP

Dengan terselesaikannya 3 (tiga) peraturan ini maka capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang– undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN sampai dengan Triwulan IV TA 2023 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 52 Capaian IKU Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengelolaan Keuangan dan BMN (Persen)

SK 2		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan							
IK 12		Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengelolaan Keuangan dan BMN (Persen)							
Realisasi 2018 – 2023						Realisasi Tahun 2023		Renstra Tahun 2020 – 2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

3.2.13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Keuangan

Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif angka profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Pengukuran IP ASN diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, terdapat beberapa penyesuaian instrumen pada dimensi IP ASN diantaranya :

- a. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan Pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
- b. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN;
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- d. Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
- e. Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja;
- f. Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Metode pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu :

Kualifikasi

Jika dibandingkan dengan pengukuran sebelumnya, nilai pada dimensi kualifikasi mengalami kenaikan dikarenakan penyesuaian bobot seperti pada tabel berikut :

Tabel 53 Penyesuaian Bobot Kualifikasi

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	JPT	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	23	22	21	20	10
		DIII	25	23	21	20	10	5
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	23	22	21	20	10	

Kualifikasi dihitung dari kondisi pendidikan terkini dari pegawai dengan ketentuan sesuai Surat Keputusan Pangkat Terakhir atau Surat Keputusan Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui pada aplikasi SIMPEG KKP;

Kompetensi

Dimensi kompetensi mencakup pemenuhan pengembangan kompetensi PNS dimana masing-masing jenjang jabatan memiliki jenis diklat yang berbeda. Oleh karena itu pengelolaan pengembangan kompetensi dan pelaporannya yang baik dapat meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN.

Tabel 54 Penyesuaian Bobot Kompetensi

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DIKUTI (BOBOT)							
		PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN		PELATIHAN FUNGSIONAL		PELATIHAN TEKNIS		SEMINAR/ KONFERENSI/ SARASEHAN/ WORKSHOP/ LOKAKARYA/ SEJENISNYA	
		SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	≥ 20 JP	< 20 JP	SUDAH	BELUM
Kompetensi	JPT	15	-	-	-	15	Proporsional	10	-
	Jabatan Administrator	15	-	-	-	15	Proporsional	10	-
	Jabatan Pengawas	15	-	-	-	15	Proporsional	10	-
	Jabatan Fungsional	-	-	15	-	15	Proporsional	10	-
	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	22,5	Proporsional	17,5	-

Menyesuaikan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Kinerja

Nilai pada dimensi ini dipengaruhi oleh pelaporan penilaian kinerja ke SIASN. Berdasarkan data yang diperoleh pemenuhan pada dimensi belum maksimal, hal ini dikarenakan Instansi belum menggunakan sistem pelaporan kinerja BKN dan/atau PNS belum menyelesaikan dan melaporkan penilaian kerjanya ke pengelola kepegawaian.

Tabel 56 Penyesuaian Bobot Kinerja

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Disiplin

Capaian pada dimensi sangat baik, dikarenakan PNS di suatu Instansi tidak ada yang dikenai atau Instansi tidak melaporkan PNS yang terkena hukuman disiplin pada SIASN.

DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT DIMENSI MAKSIMAL	BOBOT SUB
Disiplin	Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin	5	
	1 Tidak Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		5
	2 Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		
	a. Ringan		3
	b. Sedang		2
	c. Berat		1

Menyesuaikan pengenaan masa hukuman disiplin menjadi 1 (satu) tahun terakhir

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 85/SJ.3/KP.720/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Capaian Indikator Kinerja Utama IP ASN Triwulan IV Semester II Tahun 2023 dan Target IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024, capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Semester II Tahun 2023, berdasarkan hasil penutupan pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 08 Januari 2024 yaitu 84.75 (kategori Tinggi) terdiri dari Kualifikasi 21.49 Kompetensi 33.41 Kinerja 24,84 dan Disiplin 5.00 dari Target sebesar 80 (kategori Sedang).

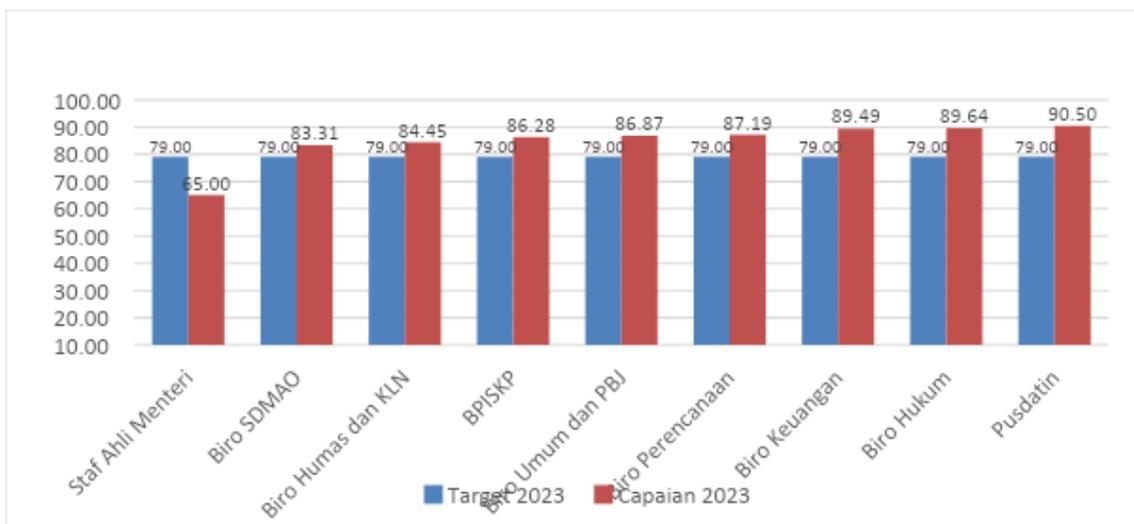
Adapun rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Setjen pada Triwulan IV Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 56 Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setjen pada Triwulan IV Semester II Tahun 2023

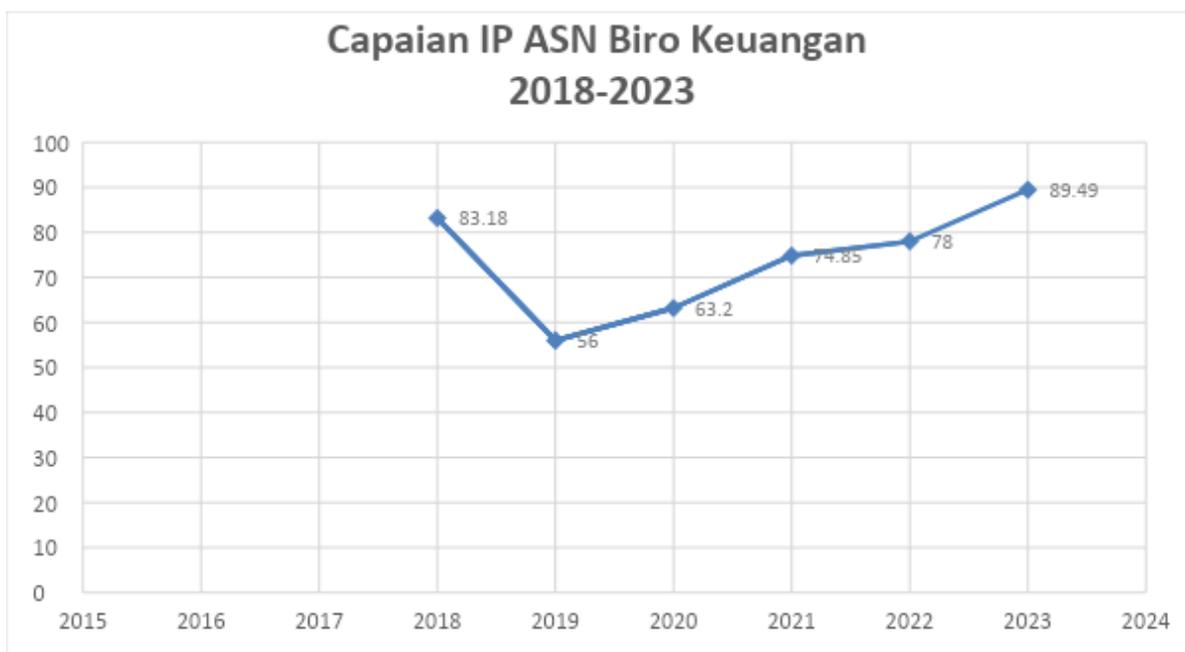
No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	22.50	12.50	25.00	5	65.00
2	Biro Perencanaan	21.43	35.00	25.75	5	87.19
3	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20.90	32.33	25.08	5	83.31
4	Biro Hukum	21.71	38.50	24.43	5	89.64
5	Biro HKLN	21.36	33.09	25.00	5	84.45
6	Biro Keuangan	21.10	38.39	25.00	5	89.49
7	Biro Umum dan PBJ	20.97	36.08	24.82	5	86.87
8	Pusdatin	21.09	39.34	25.07	5	90.50
9	BPISKP	22.38	35.47	23.44	5	86.28
	Total	21.49	33.41	24.84	5	84.75

Keterangan:

Jumlah Database sebesar 475 PNS lingkup Sekretariat Jenderal, tanpa data BP Batam dan CPNS. Data terakhir diambil pada tanggal 31 Desember 2023. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada <http://www.ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/dashboard>



Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Keuangan Triwulan IV Tahun 2023, berdasarkan hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yaitu sebesar **89.49**. Nilai tersebut berada pada kategori Tinggi dan sudah melebihi target Tahun 2023 sebesar 79. Capaian IKU IP ASN lingkup Biro Keuangan pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 113,27 % dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan. IP ASN Biro Keuangan menempati peringkat 3 dari seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dan melebihi capaian Sekretariat Jenderal yang mencapai 84,75



Gambar 14 Capaian IKU IP ASN lingkup Biro Keuangan

Adapun capaian IKU IP ASN lingkup Biro Keuangan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 57 Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Keuangan

SK 2									
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan									
IK 13									
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Keuangan									
Realisasi 2016 - 2021						Realisasi Triwulan IV Tahun 2023		Renstra Tahun 2020 – 2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra
83,18	56,00	63,2	74,85	79,95	79	89,49	113,27	85	105,28

Pada periode Tahun 2023, capaiannya mencapai 89,49 dari target 79. Faktor yang mendukung tercapainya IKU ini adalah sebagian besar pegawai sudah mengikuti beberapa Diklat Teknis khususnya yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan seperti diantaranya *E-learning* Manajemen Keuangan Negara dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. Selain itu pegawai Biro Keuangan cukup aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan *workshop* baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Instansi Pembina di luar KKP.

Pada perencanaan kinerja pegawai di awal tahun 2023, IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Keuangan telah di *cascading* ke semua pegawai. Untuk tahun 2024, metode *cascading* IKU IP ASN untuk semua pegawai akan tetap dilakukan mengingat adanya kenaikan target IP ASN di Tahun 2024 yaitu sebesar 85. Setiap pegawai diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap Nilai IP ASN masing-masing, sehingga berkontribusi terhadap meningkatkan IKU Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan.

3.2.14. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Keuangan

Nilai temuan atas laporan keuangan Biro Keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Persentase Penyelesaian Temuan BPK ini merupakan cermin dari akuntabilitas Biro Keuangan selaku koordinator dan fasilitator penyelesaian tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di lingkup Sekretariat Jenderal.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Biro Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Melalui Memorandum Kepala Biro Keuangan, Nomor 1717/SJ.2/RC610/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023, hal Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2022” dengan data rincian di bawah ini:

Tabel 58 Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2022” Tahun 2023

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Biro Umum dan PBJ	475.510.832.637	68.482.499,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Umum dan PBJ	-	38.200.599,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Perencanaan	-	-	≤1	0,00	0
	Biro Keuangan	-	30.281.900,00	≤1	0,01	100,99

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
	Biro Hukum	-	-	≤1	0,00	0
	Biro SDMAO	-	-	≤1	0,00	0
	Biro Humas dan KLN	-	-	≤1	0,00	0
	Pusdatin	-	-	≤1	0,00	0
2	LPMUKP	41.467.114.758	-	≤1	0,00	101,00
3	DEKONSETRASI	5.873.164.774	-	≤1	0,00	101,00
TOTAL		522.851.112.169,00	68.482.499,00	≤1	0,01	100,99

Keterangan:

1. Realisasi anggaran (audited) Tahun 2022
2. Nilai temuan BPK atas LK Sekretariat Jenderal Tahun 2022
3. Realisasi IKU adalah nilai temuan BPK dibandingkan dengan realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2022
4. Perhitungan % capaian adalah $[1+(1 - \text{realisasi}/\text{target})]*100$

Berdasarkan rincian tersebut, nilai temuan Biro Keuangan sebesar Rp30.281.900,- (0,01%) pada Biro Keuangan dengan Pagu sebesar Rp12.152.858.000,- dan realisasi sebesar Rp11.737.606.858,- mendapatkan nilai 109,99%, dapat diartikan **bahwa tidak ada temuan BPK** di Biro Keuangan.

Tabel 59 Capaian IKU Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan Tahun 2023

SK 2		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan							
IK 14		Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan Tahun 2023							
Realisasi 2017 – 2022						Realisasi Triwulan IV Tahun 2022		Renstra Tahun 2020 – 2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Biro Keuangan mencapai nilai 100% dari target yang ditentukan. Artinya tidak ada temuan BPK pada tahun anggaran 2023. Kemudian upaya yang dilakukan untuk memitigasi adanya temuan, Biro Keuangan melakukan koordinasi dan transparansi dalam pengendalian risiko yang terjadi di setiap triwulannya. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang terkontrol dengan baik, hal ini dapat menjadi evaluasi tersendiri bagi Biro Keuangan agar senantiasa terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target atas proses bisnis yang dijalani.

3.2.15. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan (Nilai)

Nilai PM SAKIP Biro Keuangan merupakan IKU yang menggantikan IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja . Adapun IKU ini dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni

- perencanaan kinerja (30%),
- pengukuran kinerja (30%),
- pelaporan kinerja (15%),
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP Setjen adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di Biro Keuangan dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Tabel 60 Nilai PM SAKIP Setjen

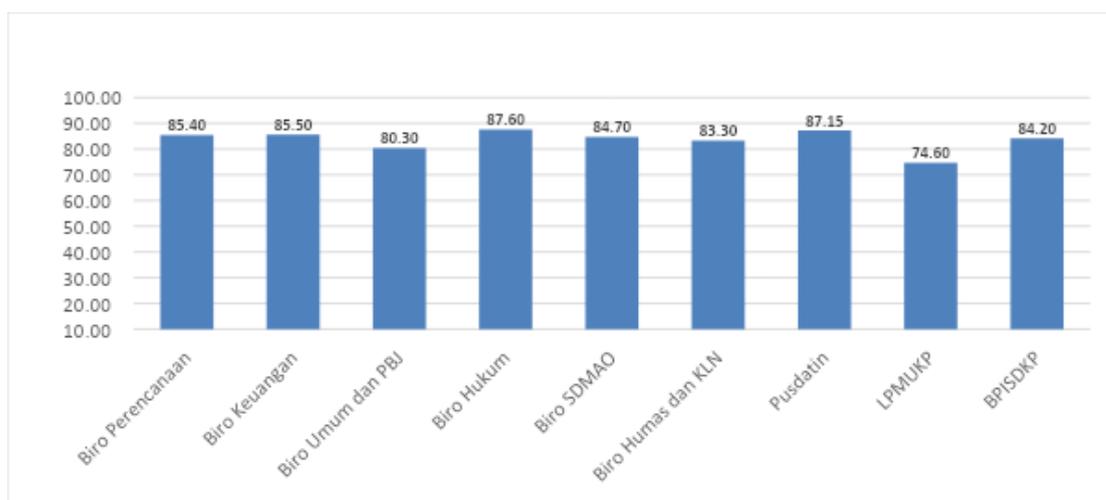
No	Unit Kerja	Nilai Akuntabilitas					Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	
1	Biro Perencanaan	27,60	24,00	13,80	20,00	85,40	A
2	Biro SDMAO	25,80	24,60	13,80	20,50	84,70	A
3	Biro Hukum	27,00	24,60	13,50	22,50	87,60	A
4	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri	25,20	24,00	11,10	23,00	83,30	A
5	Biro Keuangan	27,00	24,00	12,00	22,50	85,50	A
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	24,60	23,70	12,75	19,25	80,30	A
7	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	27,90	24,00	12,75	22,50	87,15	A
8	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP	25,20	24,00	12,60	22,50	84,30	A
9	Lembaga Pengelola Modal Usaha KP	22,20	22,80	11,10	18,50	74,60	BB

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 -- 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Berdasarkan penilaian di tahun 2023, Nilai PM SAKIP Biro Keuangan mencapai 85.50 dengan kategori A predikat memuaskan. Nilai ini diperoleh berdasarkan Memorandum Biro Perencanaan Nomor. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 pada tanggal 14 Desember 2023. Adapun rincian penilaian pada setiap biro adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan (Nilai)

SK 2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan									
IKU 15	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan (Nilai)									
Realisasi 2017 – 2022							Realisasi Tahun 2023		Renstra Tahun 2020 – 2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	80.50	85.50	106	84	



*IKU baru di 2023, pengganti IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Keuangan

Capaian Biro Keuangan merupakan capaian peringkat ke-3 di lingkup Sekretariat Jenderal. Adapun capaian ini diperoleh dengan adanya:

1. Perumusan kinerja individu setiap pegawai terkait dengan kinerja organisasi dengan menyusun matriks pembagian peran hasil dan memastikan hasil matriks tersebut dituangkan dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi
2. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan program/kegiatan untuk perencanaan kedepan sehingga dapat mengoptimalkan peningkatan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Mendorong komitmen pimpinan untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan unit kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, dengan menyajikan informasi detail pencapaian kinerja terkait analisa upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan.
5. Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja.
6. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan/peningkatan kinerja.
7. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

3.2.16. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Biro Keuangan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, reviu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 86/SJ.2/TU.210/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2023 capaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Data Rekapitulasi Capaian IKU

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	10	10	100,00	0	00,00
2	Biro Keuangan	12	12	100,00	0	00,00
3	Biro Umum dan PBJ	18	18	100,00	0	00,00
4	Biro Hukum	16	16	100,00	0	00,00
5	Biro SDMAO	24	24	100,00	0	00,00
6	Biro Humas dan KLN	1	1	100,00	0	00,00
7	PUSDATIN	7	7	100,00	0	00,00
8	LPMUKP	25	24	96,00	1	04,00
9	BPISDKP	0	0	100,00	0	00,00
TOTAL		113	112	99,12	1	00,88

Berdasarkan rekapitulasi ini terlihat bahwa Biro Keuangan berusaha maksimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Keuangan. Oleh karena itu jumlah rekomendasi sebanyak 12 dapat dituntaskan 100%.

Tabel 53 Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Biro Keuangan

SK 2		: Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan								
IKU 16		Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Biro Keuangan								
Realisasi 2017– 2022							Realisasi Tahun 2023		Renstra Tahun 2020 – 2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra
-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Keuangan adalah

- a. Segera menindaklanjuti hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal;
- b. Berdiskusi Bersama Tim SPIP untuk penjaminan Kualitas atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan; dan
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan Biro Keuangan dan anggaran secara berkala.

3.2.17. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Unit kerja Biro Keuangan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur KKP dan berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi serta menindaklanjuti hasil evaluasi IKU Manajemen Pengetahuan yang terstandar, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023 menggunakan aplikasi melalui laman ***kinerjakkp.bitrix24.com***. Adapun komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan 2 (dua) tolak ukur yaitu dokumen (**bobot 20%**) dan keaktifan (**bobot 80%**). Adapun komponen pembentuk dan cara mengukur **level 2** yaitu:

1. Penilaian dilakukan setiap Triwulan;
2. Pengukuran Dokumen:

Tabel 54 Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1 dan TW 2

TW 1	TW 2
<ul style="list-style-type: none">● Perjanjian Kinerja Level 2 Tahun 2023;● Manual IKU Level 2;● Rencana Aksi Atas PK Tahunan Level 2● Laporan Kinerja Level 2 Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none">● Perjanjian Kinerja Level 2 Tahun 2023;● Manual IKU Level 2;● Rencana Aksi Atas PK Tahunan Level 2● Laporan Kinerja Level 2 Tahun 2022● Laporan Kinerja Level 2 TW 1 Tahun 2023

A. Keaktifan :

1. Pejabat **Eselon II** dan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai **Koordinator** dan **Sub Koordinator**) diharuskan melakukan *posting* keaktifan minimal sebanyak **6 kali** pada setiap triwulan;
2. *Upload* dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil rapat yang bersifat **boleh** dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur **Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan Bagaimana**. (5W1H = *What, Where, When, Who, Why dan How*); *Share* informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan *campaign* terkait Kelautan dan Perikanan.

IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2023 mengalami perubahan karena berpindah dari aplikasi bitrix ke *collaboration Office*. Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terintegrasi pada Portal *Collaboration Office* di laman <https://portal.kkp.go.id> untuk Triwulan 3 (Juli September) Tahun 2023 lingkup Sekretariat Jenderal KKP, maka pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah pejabat setingkat eselon 2. Adapun perubahan pada penilaian komponen penilaian Manajemen Pengetahuan adalah sebagaimana pada berikut:

Tabel 62 Target dan Realisasi IKU Unit Kerja Biro Keuangan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

No	Sebelum	Sesudah
1	Komponen penilaian: dokumen (20%) dan keaktifan (80%)	Komponen penilaian: keaktifan (100%)
2	Aplikasi Bitrix24	Aplikasi Collaboration Office
3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4
4	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2, Koordinator, dan Sub koordinator lingkup pusat	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja

Tabel 63 Capaian IKU Unit Kerja Biro Keuangan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

SK 2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan							
IKU 17	Unit Kerja Biro Keuangan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar							
Target & Capaian	Target TW 1	Capaian TW 1	Target TW 2	Capaian TW 2	Target TW 3	Capaian TW 3	Target TW 4	Capaian TW 4
	92	100	92	100	92	133.33	92	133.33

SK 2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan									
IKU 17	Unit Kerja Biro Keuangan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar									
Realisasi 2017- 2022							Realisasi Tahun 2023		Renstra Tahun 2020 – 2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra
65	90.56	94.58	91.11	84.93	100	92	116.67	126.81	94	124

Sesuai Memorandum Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Nomor 20/SJ.7/TU.210/II/2024 Tanggal 3 Januari 2024 Hal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar lingkup Sekretariat Jenderal KKP pada triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

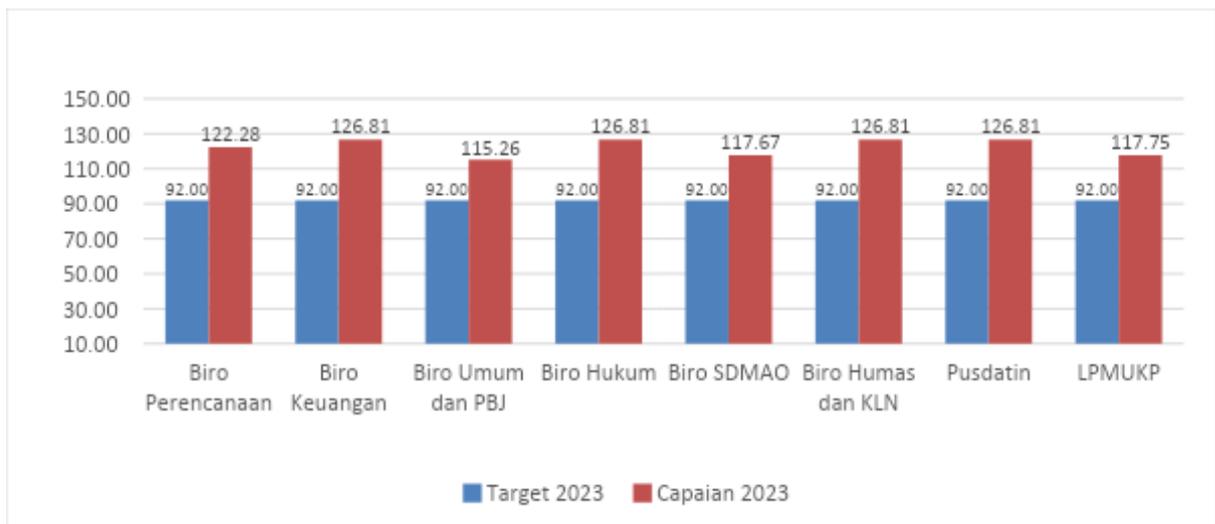
1. Nilai capaian IKU MP Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 133,33%. Capaian tersebut diperoleh dari 7 (tujuh) satuan kerja dan LPMUKP dengan nilai masing-masing 133,33%. 3. Nilai capaian IKU MP Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023 adalah sebesar 112,59%. Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2023. Nilai tertinggi adalah sebesar 116,67% berhasil dicapai oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan, Biro Hukum, dan Pusat Data, Statistik dan Informasi.

2. Adapun rincian penilaian hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Setjen KKP pada Triwulan IV Tahun 2023 yang diperoleh masing-masing unit kerja lingkup Setjen adalah:

Tabel 64 Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Setjen KKP Tahun 2023

Capaian IKU MP Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Triwulan				Capaian	Target	% Capaian
		I	II	III	IV			
1	Biro Perencanaan	100,00	100,00	116,67	133,33	112,50	92,00	122,28
2	BHKLN	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
3	Biro Keuangan	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
4	BSDMAO	100,00	99,68	100,00	133,33	108,25	92,00	117,67
5	Biro Hukum	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
6	Biro Umum dan PBJ	92,59	98,25	100,00	133,33	106,04	92,00	115,26
7	Pusdatin	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
8	LPMUKP	100,00	100,00	100,00	133,33	108,33	92,00	117,75



Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung dengan adanya upaya antara lain :

1. Monitoring terkait dengan capaian IKU Manajemen Pengetahuan TW 1 dan TW 2 melalui *whatsapp group* dan juga ini menjadi IKI pada SKP para penanggungjawab IKU Manajemen Pengetahuan yaitu koordinator dan sub koordinator
2. Pada manajemen pengetahuan pada *collaboration office* dilakukan proses posting melalui informasi yang disampaikan pada sosial media Biro Keuangan yaitu instagram sehingga adanya kesesuaian postingan baik pada *collaboration office* maupun sosial media

Untuk mempertahankan capaian indikator pada periode selanjutnya upaya yang akan dilakukan antara lain koordinasi dengan tim humas Biro Keuangan sehingga informasi yang disampaikan lebih informatif dan memiliki infografis dengan visual yang menarik.

3.2.18. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan

Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan adalah perhitungan capaian realisasi anggaran Biro Keuangan dibandingkan dengan pagu anggaran Biro Keuangan. Realisasi anggaran menggunakan realisasi per tanggal 31 Desember dengan melampirkan hasil tangkap layar realisasi pada aplikasi SAKTI per 31 Desember sebagai dokumen pendukung. Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan merupakan IKU yang digunakan sebagai monitoring maupun evaluasi terhadap anggaran di lingkup Biro Keuangan. Capaian realisasi penyerapan Biro Keuangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 65 Capaian Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan Tahun 2023

NO.	KEGIATAN	PAGU Awal (Rp.)	PAGU Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	9.983.337.000	7.276.010.000	7.220.527.097	99.24
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	3.694.000.000	2.026.600.000	2.015.005.486	99.43
		3.644.620.000	3.434.620.000	3.412.761.669	99.36
JUMLAH		17.321.957.000	12.737.230.000	12.648.294.252	99.36

Dari hasil tabel di atas pagu anggaran unit kerja Biro Keuangan adalah sebesar Rp 12.737.230.000 dengan realisasi sebesar Rp **12.648.294.252** dengan sisa anggaran sebesar Rp **88.815.748** atau sebesar 99.34%. Pada tahun 2023 Biro Keuangan mendapat Blokir *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp4.554.727.000, sehingga harus memperhatikan prioritas dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Langkah yang dilakukan Biro Keuangan dalam pencapaian penyerapan anggaran adalah:

- a. melakukan koordinasi internal secara rutin dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan realisasi pada apel pagi lingkup Biro Keuangan;
- b. melakukan penyusunan perencanaan anggaran dengan meminimalkan pemblokiran anggaran pada saat penyusunan anggaran;

- c. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan;
 - a. melakukan usulan revisi anggaran untuk optimalisasi penggunaan anggaran dengan memperhatikan kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan;

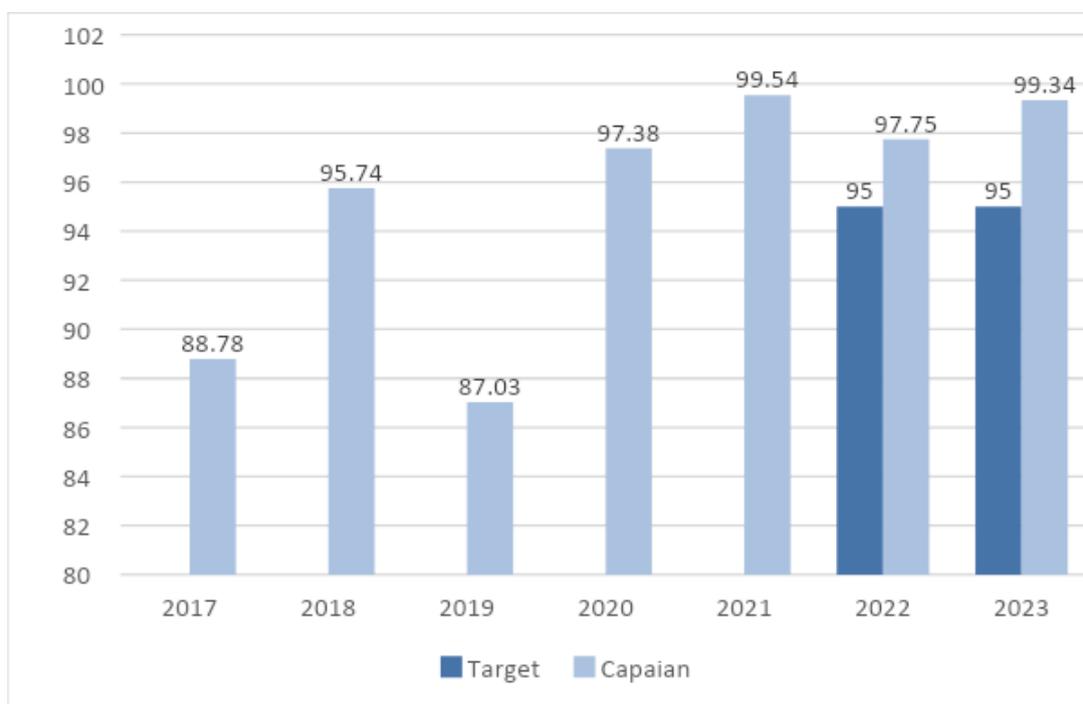
Tabel 66 Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan

SK 2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan									
IKU 18	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan									
Realisasi 2017 – 2022							Realisasi Tahun 2023		Renstra Tahun 2020 – 2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target 2024	% Capaian TW thd Target Akhir Renstra
88.78	95.74	87.03	97.38	99.54	97.75	95	99.34	104.57		

**IKU Baru di tahun 2022*

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menunjang tugas dan fungsi Biro Keuangan didukung dengan 59 pegawai dan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Keuangan. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Pagu beserta realisasi anggaran Biro Keuangan pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:



Pengukuran Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang sudah tersedia. Adapun efisiensi yang dicapai Biro Keuangan adalah sebagai berikut:

Tahun	NKO	Anggaran	Realisasi	%	%NSPSX Anggaran	% Efisiensi Anggaran
	1	2	3	4	5=1x2	6=5-3
2022	107,33	12.152.858.000	11.878.381.917	97,74%	1.304.366.249.140	1.292.487.867.223
	% Efisiensi 2022 = (6/2)/100					106,35%
2023	109,5	12.737.230.000	12.655.154.252	99,36%	1.394.726.685.000	1.382.071.530.748
	% Efisiensi 2023 = (6/2)/100					108,51%

Hasil optimalisasi pelaksanaan anggaran untuk menghasilkan efisiensi ini dalam optimalisasi program dan kegiatan di lingkungan Biro Keuangan, antara lain adalah: Pemanfaatan teknologi dan informasi sehingga rapat koordinasi yang dilaksanakan secara *zoom meeting* terutama jika ada kegiatan yang bersamaan;

1. Sarana untuk menghimpun semua data yang diperlukan terkait tugas dan fungsi di Biro Keuangan telah dilaksanakan secara *paperless* melalui *google drive* dan *drop box*;
2. Optimalisasi sharing informasi melalui data yang bisa diakses secara online

Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang dilakukan di Biro Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penghitungan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Keuangan Tahun 2023 adalah 109.5% dan bisa terlihat bahwa nilai NKO di Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 107.33%. Di Tahun 2023 Biro Keuangan telah mencapai predikat baik secara keseluruhan. Pada 17 Indikator Kinerja(IK) terdapat 1 IK yang masih belum memenuhi target yaitu pada Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP yaitu dari target 93,75 capaian 91.99. Adapun IKU IKPA KKP mengalami perubahan target yang sebelumnya 89 menjadi 93,75 yang merupakan perubahan target dalam pemenuhan reformasi birokrasi.

Dalam pemenuhan seluruh target IK Biro Keuangan hingga akhir tahun 2023, Biro Keuangan telah mendayagunakan anggaran melalui penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.655.154.252 dari pagu efektif Rp. 12.737.230.000. Dengan demikian, pada tahun 2023 telah dilakukan penyerapan efektif sebesar 99,36% dari APBN KKP yang dialokasikan untuk membiayai kinerja Biro Keuangan.

Biro Keuangan di Tahun 2023 telah berusaha maksimal sehingga mampu mendapatkan penghargaan Capaian Kinerja terbaik ke-3 lingkup Sekretariat Jenderal. Biro Keuangan dalam pencapaiannya telah berkomitmen untuk mencapai target yang diharapkan dan ini menunjukkan:

1. Keterlibatan pimpinan dan para pegawai Biro Keuangan dalam mencapai target IKU dan menunjang nilai organisasi
2. Dukungan aktif segenap jajaran di lingkup Biro Keuangan dan seluruh *stakeholder*.
3. Terus menerus menjaga pencapaian target kinerja di tengah keterbatasan ruang gerak dan keterbatasan anggaran.

4. Rencana Aksi di tahun 2023 yang telah disusun terus dilaksanakan dan dievaluasi berkala untuk mempertahankan prestasi kinerja organisasi.
5. Pembenahan tata kerja, pemanfaatan teknologi dan informasi, digitalisasi, inovasi-inovasi baru serta digital *awareness* bagi setiap pegawai/pejabat.
6. Semua tahapan untuk pencapaian target kinerja dievaluasi bersama untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi agar kinerja tetap terjaga.

4.2. Upaya Perbaikan

Dalam mencapai perbaikan capaian kinerja Biro Keuangan dilakukan beberapa hal untuk periode ke depannya:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menunjang tugas dan fungsi Biro Keuangan dengan tujuan membuat langkah taktis dan strategis dalam mencapai IKU
2. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga bila terdapat indikasi terkait IKU yang sulit mencapai target dapat dicari solusi dan langkah yang tepat dalam mencapai target IKU
3. Pengembangan SDM yang mampu menunjang tugas dan fungsi Biro Keuangan sehingga dapat merealisasikan tata kelola pemerintahn yang baik (*good governance*)

Demikian Laporan Kinerja Biro Keuangan disusun sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja di tahun selanjutnya.

Jakarta, 16 Januari 2024

Kepala Biro Keuangan



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Setyawati**

Jabatan : Kepala Biro Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Plh. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plh. Sekretaris Jenderal

Effin Martiana

Pihak Kesatu
Kepala Biro Keuangan

Setyawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BIRO KEUANGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga	1	Nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan (nilai)	3,45
		2	Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)	2,74
		3	Indeks Pengelolaan Keuangan (Indeks)	0,65
		4	Tingkat Kepatuhan BMN Setjen (persen)	80
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setjen (nilai)	89
		6	Nilai Kinerja Anggaran Setjen (nilai)	86
		7	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2022 (persen)	≤0,5
		8	Level Maturitas SPIP KKP (level)	3
		9	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen (persen)	75
		10	Nilai pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	100
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan	11	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (persen)	100
		12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Keuangan (indeks)	79
		13	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Keuangan (persen)	100
		14	Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro Keuangan (nilai)	93
		15	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Keuangan (persen)	75
		16	Unit kerja Biro Keuangan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		17	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	9.983.337.0000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	7.338.620.000
Total Anggaran Biro Keuangan Tahun 2023		17.321.957.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plh. Sekretaris Jenderal


Effin Martiana

Pihak Kesatu
Kepala Biro Keuangan


Setyawati

ST Tim Kerja Biro Keuangan berdasarkan Mekanisme Kerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

SURAT TUGAS NOMOR B.1990/SJ.2/KP.440/VIII/2023

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan perubahan penugasan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja lingkup Biro Keuangan.
- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

- Kepada** : Pegawai yang ditunjuk dalam susunan keanggotaan Tim Kerja lingkup Biro Keuangan.
- Untuk** : 1. Menjadi Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. Memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan uraian fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan penuh tanggung jawab; dan
3. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Biro Keuangan.

Surat Tugas ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Jakarta, 1 Agustus 2023
Kepala Biro Keuangan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA LINGKUP BIRO KEUANGAN

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja	
		PB	KEPA	PA	P. BMN	APK	TL		Dukman
1	Muhono 196411281986011001 Pembina Utama Muda, IV/c APK APBN Ahli Madya	Ketua				Anggota			15
2	Nugroho Budiharto 198307272006041003 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda		Anggota	Ketua					15
3	Aris Suyono 197403292003121002 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Madya		Ketua			Anggota			15
4	Sutrisno Subagyo 197406222009011002 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Madya				Anggota	Ketua			15
5	Herlan Suherlan 197504272002121008 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Muda					Anggota	Ketua		15
6	Moch. Bayu Dipanegara 197804042009011002 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia				Ketua	Anggota			15

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR/E, BSSN

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja	
		PB	KEPA	PA	P. BMN	APK	TL		Dukman
7	Meirda Utama 198205242002121003 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda					Anggota		Ketua	15
8	Arifin Syam, S.E., M.Si 197503242002121008 Pembina Tk.I – IV/b APK APBN Ahli Madya	Anggota			Anggota	Anggota			15
9	Dian Hesty Andayani 197605061999032001 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda			Anggota	Anggota	Anggota			15
10	Aries Sariyanto 197304172005021001 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda			Anggota		Anggota	Anggota		15
11	Revo Triono Adi Saputro 197607182005021002 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda	Anggota	Anggota			Anggota			15
12	Martha Lusya Pasaribu 197810222009012002 Penata Tk.I/III/d APK APBN Ahli Muda	Anggota				Anggota	Anggota		15
13	Agus Prasetyo 198211282009121001 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda	Anggota			Anggota	Anggota			15
14	Brigitta Dhenny Putrianti 198510252009012001 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Anggota		Anggota	Anggota		15

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR/E, BSSN

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KEPA	PA	P. BMN	APK	TL	Dukman	
15	Hariato Eka Putra 198511152010011021 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Anggota	Anggota		Anggota		15
16	Wisnu Danang Saputro 198104082015031003 Penata Muda Tk.I, III/b APK APBN Ahli Pertama		Anggota	Anggota		Anggota			15
17	Budiani Ayu Damayanti 198202042009122001 Penata Tk.I, III/d Analisis Hukum	Anggota				Anggota	Anggota		15
18	Sylvia Ratna Esther P. 197810162011012004 Penata, III/c APK APBN Ahli Muda					Anggota	Anggota		10
19	Rahmah Nurhila 198611202010122002 Penata, III/c APK APBN Ahli Pertama					Anggota	Anggota		10
20	Dicky Asoksan Rachmana 198306222014031001 Penata Muda Tk.I, III/b APK APBN Ahli Pertama				Anggota	Anggota			10
21	Irmala Shitta 199409022018012003 Penata Muda, III/a Analisis Anggaran Ahli Pertama	Anggota		Anggota					10

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KEPA	PA	P. BMN	APK	TL	Dukman	
22	Kuni Afifah 199404302018012005 Penata Muda, III/a APK APBN Ahli Pertama		Anggota			Anggota			10
23	Adityo Lukie Nugroho 198304062009011003 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda		Anggota			Anggota			10
24	Tut Wuri Handayani 19720110199032001 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia				Anggota	Anggota			10
25	Sundari Ika Binarti 198105292005022001 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia			Anggota	Anggota				10
26	Donna Arwinda 198306012006042002 Penata Muda Tk.I, III/b Penata Laksana Barang Mahir		Anggota		Anggota				10
27	Rovvy Mariani Manusiwa 197910252009042006 Penata Tk.I/III/d Penata Laksana Barang Penyelia				Anggota		Anggota		10
28	Wuri Samiyoto 198210142009121001 Penata Muda, III/a Penata Laksana Barang Mahir	Anggota			Anggota				10

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja	
		PB	KEPA	PA	P. BMN	APK	TL		Dukman
29	Agustinus Ari Susilo .W 197408282005021001 Penata, III/c PK APBN Mahir	Anggota				Anggota			10
30	Rif'ani Aswab 198412272009121001 Penata Muda Tk.I, III/b PK APBN Mahir					Anggota		Anggota	10
31	Irwan 197306052003121003 Penata Muda, III/a PK APBN Terampil					Anggota		Anggota	10
32	Gondo Kusumo 198104032012121004 Pengatur, II/c PK APBN Terampil					Anggota		Anggota	10
33	Wiji Mutia Hardianti 199308302018012001 Penata Muda, III/a Analisis Kepegawaian Pertama		Anggota					Anggota	10
34	Satriani Situmorang 198909152020122004 Penata Muda, III/a Pengelola PBJ Pertama			Anggota				Anggota	10
35	Nyimas Halida Safarina C. 197702162003122003 Pembina, IV/a Analisis Keuangan		Anggota	Anggota					10

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR/E, BSSN

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja	
		PB	KEPA	PA	P. BMN	APK	TL		Dukman
36	Ika Desmiarti 197912092003122002 Penata Tk.I, III/d Analisis Monitoring			Anggota			Anggota		10
37	Amilia 198302102009012005 Penata, III/c Analisis Keuangan			Anggota		Anggota			10
38	Kusnadi 196604111992031001 Penata Muda Tk.I, III/b Penyusun Laporan Keuangan						Anggota	Anggota	10
39	Gianta Dear 197903302009011001 Penata Muda Tk.I, III/b Pengelola BMN		Anggota		Anggota				10
40	Wahyu Widya Nugraheni 198606132009122001 Penata Muda Tk.I, III/b Sekretaris				Anggota			Anggota	10
41	Alia Rahmadani 199203102020122004 Penata Muda, III/a Analisis Keuangan		Anggota			Anggota			10
42	Bagus Aji Darmawan 199901232019121001 Pengatur/II/c Pengelola Keuangan	Anggota		Anggota					10

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR/E, BSSN

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja	
		PB	KEPA	PA	P. BMN	APK	TL		Dukman
43	Zasarah Zahwa Tarigan 199802202019122001 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan				Anggota	Anggota			10
44	I Putu Surya Sentana Putra 199902202021011003 Pengatur, II/c Pengelola BMN			Anggota	Anggota				10
45	Paulus Tupado 199909242021011002 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan	Anggota	Anggota						10
46	Faaza Naima 199909272021012002 Pengatur, II/c Pengelola BMN				Anggota		Anggota		10
47	Hamzah Nur Iqbal 199909252022011001 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan		Anggota			Anggota			10
48	Shafira Zahdanti 200002132022012003 Pengatur, II/c Pengelola BMN				Anggota			Anggota	10
49	Muchamad Ali Akbar 200008072022011003 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan	Anggota			Anggota				10

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR/E, BSSN

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja	
		PB	KEPA	PA	P. BMN	APK	TL		Dukman
50	Dirtan Janssem Manalu 199901312019121001 Pengatur Muda, II/a Pengadministrasi Keuangan	Anggota				Anggota			10
51	Brythania Ananta Mega Pratiwi 199810182019122002 Pengatur Muda, II/a Pengadministrasi Keuangan	Anggota						Anggota	10
52	Dading Surya Al Majid 200105052023021001 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi			Anggota				Anggota	10
53	Naufal Rifqi Yusnandar 200105012023021002 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi	Anggota						Anggota	10
54	Muhammad Hadi 200009262023021003 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi					Anggota		Anggota	10
55	Muhammad Oka Munggara - - Analisis Barang Milik Negara				Anggota			Anggota	10
56	Elfian - - Pelaksana Administrasi						Anggota	Anggota	10

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR/E, BSSN

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KEPA	PA	P. BMN	APK	TL	Dukman	
57	Ranti Hasmiyasari - Sekretaris					Anggota		Anggota	10
58	Sabrian Bassel - Sekretaris		Anggota					Anggota	10
59	Hari Aulia Haveirda Putra - Pelaksana Administrasi					Anggota		Anggota	10
60	Sholikan - Driver							Anggota	5
61	Indriyani - Pramubakti							Anggota	5

Keterangan:

1. PB = Perbendaharaan
2. KEPA. = Kepatuhan Internal
3. PA = Pelaksanaan Anggaran
4. P. BMN = Pengelolaan Barang Milik Negara
5. APK = Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. TL = Tindak Lanjut
7. Dukman = Dukungan Manajerial

Kepala Biro Keuangan



Setyawati

Ditandatangani
Secara Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BStE, BSSN